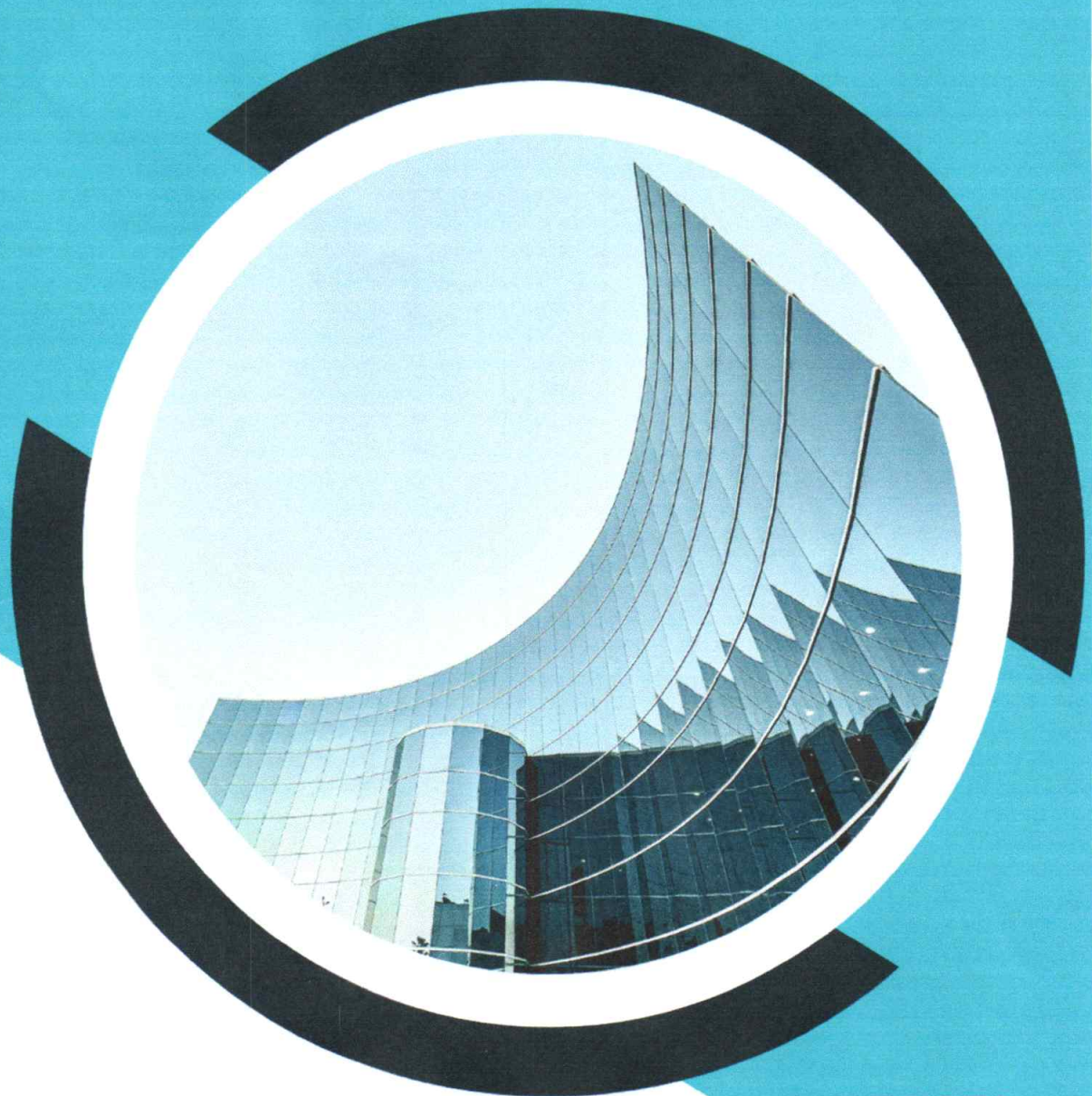




RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA



**DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA
TARAKAN
TAHUN 2026**

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kami ucapkan kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua, sehingga Penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan Tahun 2026 dapat diselesaikan dengan baik. Rancangan Awal Rencana Kerja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan disusun berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025-2030.

Tujuan disusunnya Rancangan Awal Rencana Kerja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan Tahun 2026 adalah untuk menggambarkan secara menyeluruh tentang Rancangan Awal Rencana Kerja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat yang meliputi Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah serta Tujuan dan Sasaran Program Kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2026.

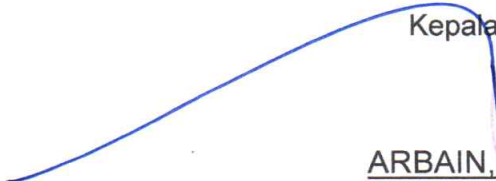
Penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan Tahun 2026 ini masih jauh dari sempurna, mengingat keterbatasan waktu, dana dan kemampuan yang tersedia, untuk itu saran dan masukan yang membangun sangat diharapkan dari pembaca.


Tidak lupa ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja ini. Akhirnya kami berharap Rancangan Awal Rencana Kerja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2026 ini nantinya dapat menjadi acuan dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Tarakan ke depannya.

Demikianlah Rancangan Awal Rencana Kerja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan ini disusun dengan harapan dapat diterima dan diwujudkan bersama.

Tarakan, 24 September 2025

Kepala Dinas,


ARBAIN, SE. M.AP
Pembina Utama Muda
NIP. 19680318 199403 1 007



DAFTAR ISI

| | |
|--|-----------|
| Kata Pengantar | I |
| Daftar Isi | 1 |
| Daftar Tabel | 2 |
| BAB I PENDAHULUAN | 3 |
| 1.1 Latar Belakang | 4 |
| 1.2 Landasan Hukum | 5 |
| 1.3 Maksud dan Tujuan | 6 |
| 1.4 Sistematika Penulisan | 7 |
| BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN LALU | 10 |
| 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu dan Capaian Renstra | 11 |
| 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah | 15 |
| 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah | 17 |
| 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD | 18 |
| 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat | 27 |
| BAB III TUJUAN DAN SASARAN | 28 |
| 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional | 29 |
| 3.2 Tujuan dan Sasaran | 29 |
| BAB IV PROGRAM DAN KEGIATAN | 30 |
| BAB V PENUTUP | 37 |



DAFTAR TABEL

| | | |
|---------|-------|----|
| Tabel 1 | | 11 |
| Tabel 2 | | 16 |
| Tabel 3 | | 19 |
| Tabel 4 | | 29 |
| Tabel 5 | | 32 |





BAB I

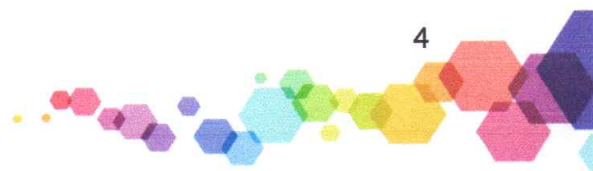
PENDAHULUAN

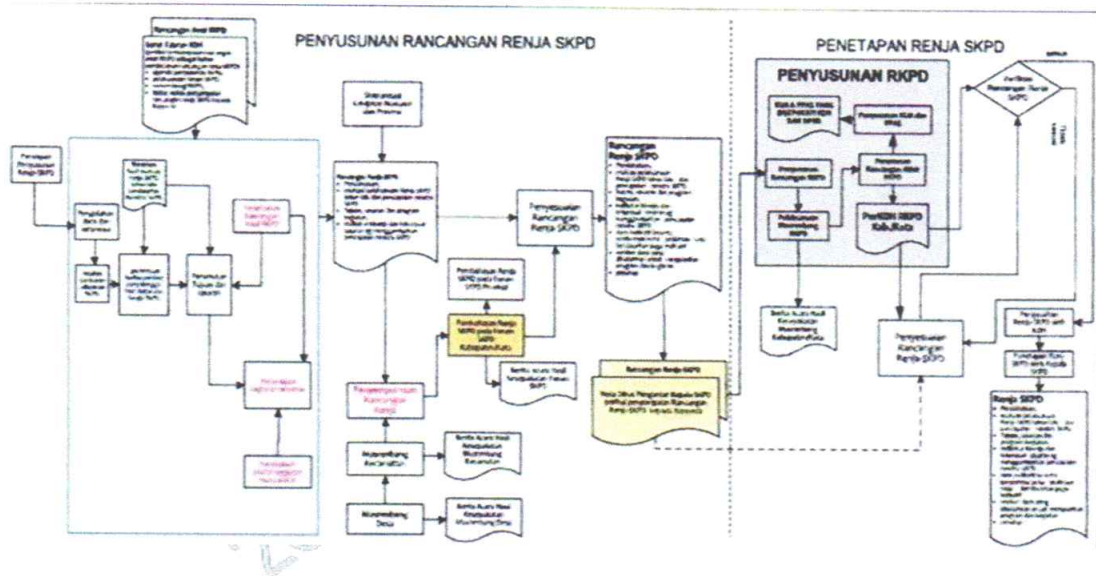
1.1 LATAR BELAKANG

Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat Ranwal Renja PD merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode jangka pendek satu tahun ke depan. Ranwal Renja PD berfungsi sebagai acuan dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah dalam membangun daerah sebagai turunan dari Rencana Strategis dalam pembangunan daerah. Ranwal Renja PD memuat hasil evaluasi renja tahun lalu, dan memuat tujuan dan sasaran renja serta memuat program dan kegiatan untuk satu tahun ke depan yang berpedoman pada Rencana Strategis Perangkat Daerah. Ranwal Renja PD juga mempunyai kedudukan yang strategis, yaitu menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) yang disusun oleh masing-masing Perangkat Daerah secara terpadu, partisipatif dan demokratis. Ranwal Renja PD juga digunakan sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA).

Berdasarkan pada uraian diatas serta untuk menjawab permasalahan yang terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat, maka disusunlah Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan Tahun 2026.

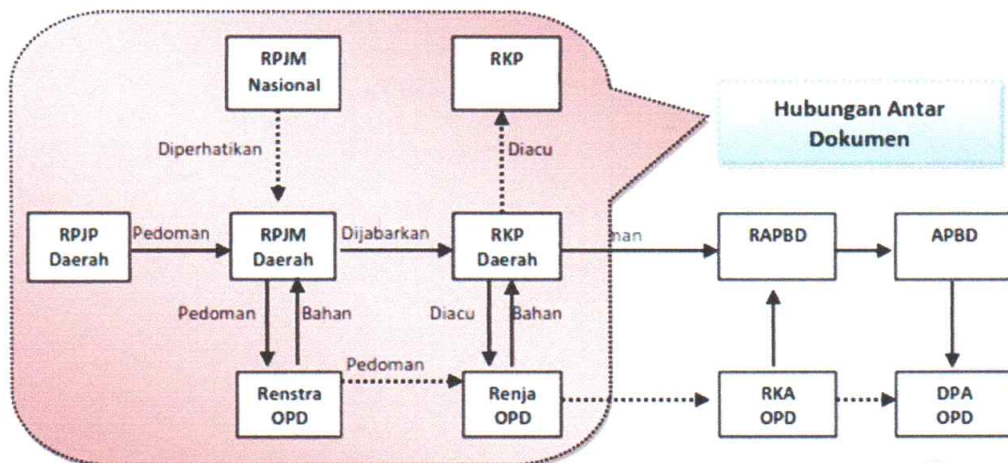
Dalam prosesnya, penyusunan rancangan Renja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat mengacu pada Renstra dan RKPD dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting, evaluasi pelaksanaan Rencana kerja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat. Renja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dilakukan dengan pengesahan oleh Kepala Daerah, selanjutnya Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat menetapkan Renja DINSOSPM untuk menjadi pedoman di lingkungan DINSOSPM dalam menyusun program dan kegiatan prioritas pada tahun anggaran tersebut.





Gambar 1.1 Bagan Alur Rancangan Renja Perangkat Daerah

Renja Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat sebagai dokumen perencanaan pembangunan tahunan di lingkup satuan kerja merupakan penjabaran dari Renstra Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat yang merupakan rencana pembangunan jangka waktu lima tahunan. Seluruh dokumen tersebut merupakan bagian dari sistem perencanaan pembangunan sebagai sebuah proses yang sistematis dan terpadu. Karena sistem perencanaan pembangunan merupakan sebuah proses yang sistematis dan terpadu, maka seluruh tahapan dan dokumen - dokumen yang dihasilkan harus menunjukkan adanya keterkaitan yang erat antara satu dengan yang lainnya.



Gambar 1.2 Bagam Hubungan Antar Dokumen Perencanaan Daerah

1.2 LANDASAN HUKUM

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat adalah :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tk. II Tarakan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 82 Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 3711);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial;
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin;
8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara;
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah(Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2005 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548)
10. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal menggantikan Peraturan Pemerintah sebelumnya Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan



Minimal;

14. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2020 Tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2021;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Pembangunan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksana Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
24. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah tahun 2025 – 2029



25. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050 -5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
26. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah;
27. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
28. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tarakan Tahun 2021 - 2041;
29. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Tarakan Tahun 2025 – 2045;
30. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tarakan Tahun 2025 - 2029;
31. Peraturan Walikota Tarakan Nomor 55 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Tata Kerja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan;
32. Surat Keputusan Wali Kota Tarakan Nomor 100.3.3.3/HK-IV/204/2025 tentang Tim Penyusun Rencana Strategis Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan Tahun 2025-2029.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Rencana Awal Rencana Kerja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan ini adalah untuk menetapkan dokumen perencanaan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan yang memuat program, kegiatan dan sub kegiatan yang diperlukan guna mencapai sasaran yang telah direncanakan yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Tujuan dilakukan penyusunan Rencana Awal Rencana Kerja ini adalah :

1. Sebagai acuan arah kebijakan dan pelaksanaan kegiatan tahun berjalan yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan yang berdasarkan dari Rencana Strategi (Renstra) Dinas Sosial dan



Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan.

2. Merumuskan program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan selama Tahun 2026.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan dalam penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2026 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang penyusunan Renja, landasan hukum penyusunan Renja, maksud dan tujuan penyusunan Renja dan sistematika penulisan dokumen Renja.

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Memuat evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat tahun lalu dan capaian Renstra, analisa kinerja pelayanan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan, isi-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat, review terhadap rancangan awal RKPD Tahun 2026 serta penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN

Bab ini memuat telaahan terhadap kebijakan nasional, indikator kinerja tujuan dan sasaran Renja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan

BAB IV PROGRAM DAN KEGIATAN

Bab ini memuat program dan kegiatan serta sub kegiatan pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2026

BAB V PENUTUP

Berisikan uraian penutup berupa catatan penting yang perlu mendapat perhatian baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan serta rencana tindak lanjut.





BAB II

HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

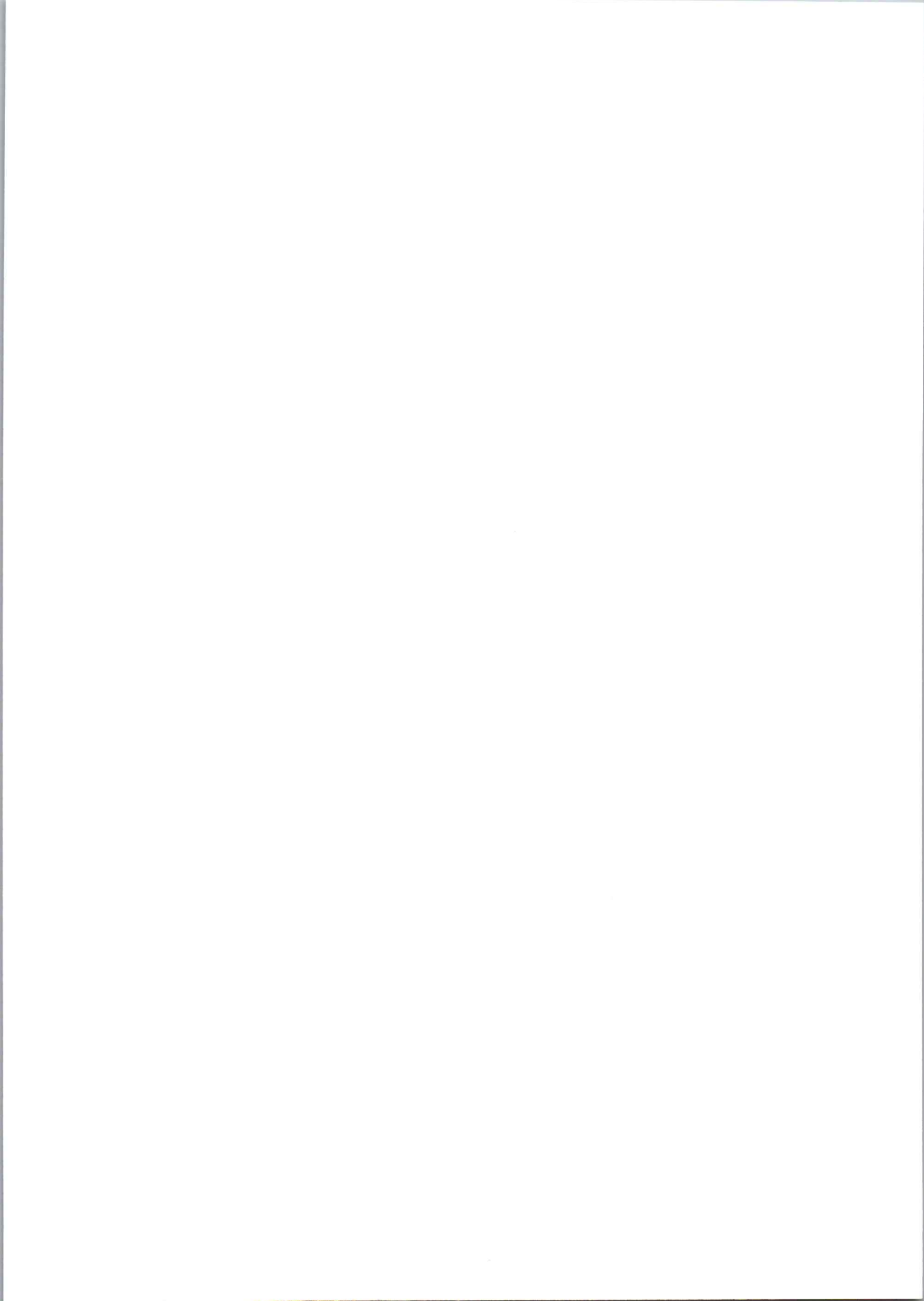
2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA

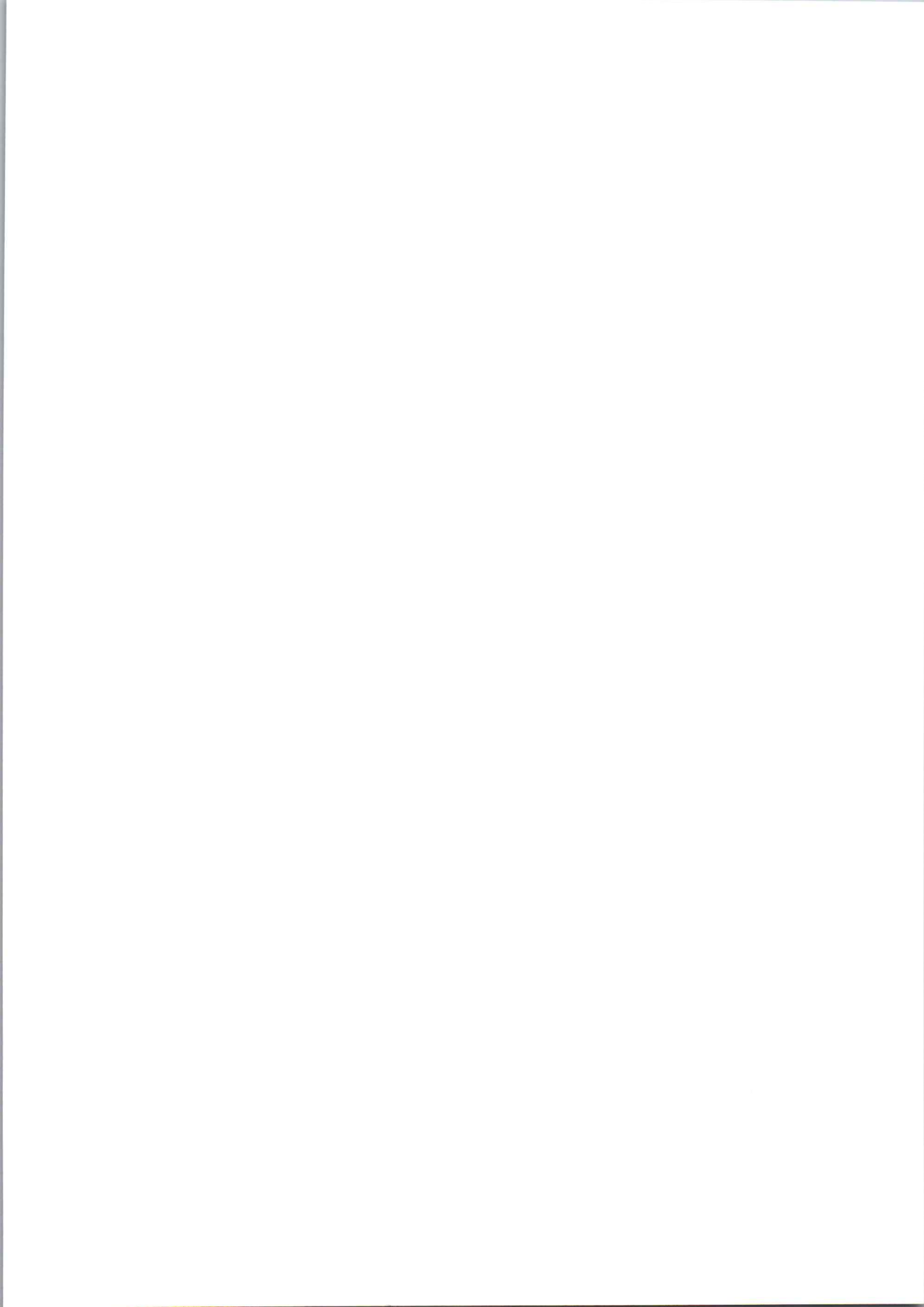
Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya. Evaluasi terhadap Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2025 meliputi 3 (tiga) hal yaitu kebijakan perencanaan program dan kegiatan, pelaksanaan rencana program, kegiatan dan hasil rencana program dan kegiatan. Hasil evaluasi pelaksanaan Rancangan Awal Rencana Kerja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat tahun lalu ditujukan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat serta hambatan permasalahan yang dihadapi.

Pada tahun lalu (n-2) Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat melaksanakan 8 (Delapan) Program, 13 (Tiga Belas) Kegiatan dan 33 (Tiga Puluh Tiga) Sub Kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 7.393.559.206,- dengan realisasi sebesar Rp 16.840.527.078,- atau 85,32%.

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta realisasi anggaran yang dilaksanakan pada tahun 2024 dapat dilihat pada tabel 1 dibawah ini :







Tabel 1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024
Kota Tarakan

Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat

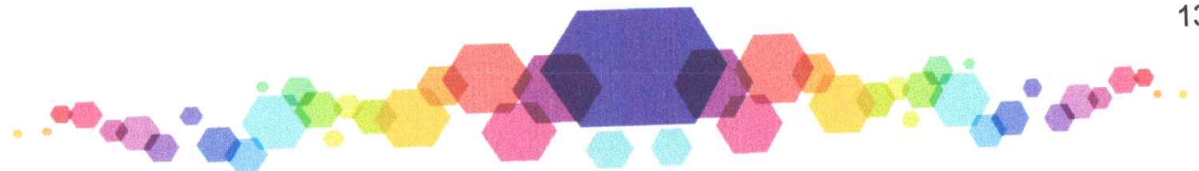
| Kode | | | | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024 (n-2) | | | | | | | | | | |
|------|----|----|------|---|---|--|---------------|---------------|-------------------------------|---------------|---------------|-----------------------|--------|-------|--|--|
| | | | | | | Target Renja PD Tahun 2024 | | | Realisasi Renja PD Tahun 2024 | | | Tingkat Realisasi (%) | | | | |
| | | | | | | K | Rp | | K | Rp | | K | Rp | | | |
| (1) | | | | (2) | (3) | (6) | | | (7) | | | (8) | | | | |
| | | | | SOSIAL | | | 7.393.559.206 | | | 6.486.724.616 | | | | | | |
| 1 | 6 | 01 | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | 4.182.237.871 | | | 3.748.261.456 | | | | | | |
| | | | | Meningkatnya penguatan internal akuntabilitas kinerja | Persentase LHE AKIP yang ditindaklanjuti | | | 4.182.237.871 | | | 3.748.261.456 | | | | | |
| | | | | | Capaian Kinerja Organisasi | | | | | | | | | | | |
| 1 | 6 | 01 | 2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah layanan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah | | | | | | | | | | | |
| 1 | 06 | 01 | 2.01 | 0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | | | | | | | |
| 1 | 06 | 01 | 2.01 | 0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | | | | | |
| 1 | 06 | 01 | 2.01 | 0008 | Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah | Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah | | | | | | | | | | |
| 1 | 6 | 01 | 2.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Jumlah layanan administrasi keuangan yang diselesaikan tepat waktu | | | 3.559.808.911 | | | 3.171.103.589 | | | | |
| 1 | 06 | 01 | 2.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 312 | Org/bln | 3.504.422.911 | 312 | Org/bln | 3.116.857.589 | 100,00 | 88,94 | | |
| 1 | 06 | 01 | 2.02 | 0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 4 | dok | 55.386.000 | 4 | dok | 54.246.000 | 100,00 | 97,94 | | |
| | | | | | Meningkatnya kualitas layanan kesekretariatan | Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (Indeks) | | | - | | | - | | | | |



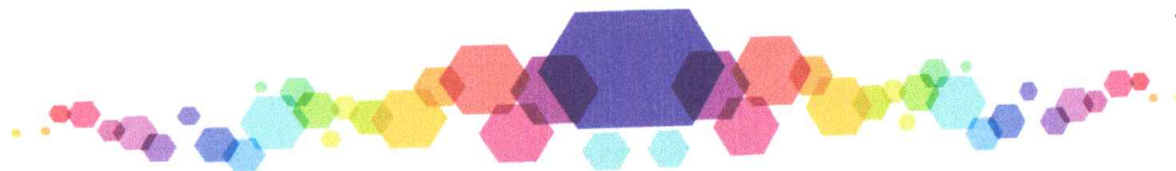
| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024 (n-2) | | | | | | | |
|------|---|----|------|----|---|--|--|--------------------|-------------|-------------------------------|---------|-------------|-----------------------|--------|
| | | | | | | | Target Renja PD Tahun 2024 | | | Realisasi Renja PD Tahun 2024 | | | Tingkat Realisasi (%) | |
| | | | | | | | K | Rp | | K | Rp | | K | Rp |
| (1) | | | | | (2) | (3) | (6) | | (7) | | (8) | | | |
| 1 | 6 | 01 | 2,05 | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Jumlah layanan administrasi kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu | | | | | | | | |
| 1 | 6 | 01 | 2,05 | 02 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan | | | | | | | | |
| 1 | 6 | 01 | 2,06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah layanan administrasi umum yang terlaksana | | 99.744.280 | | 82.924.949 | | | | |
| 1 | 6 | 01 | 2,06 | 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 1 | paket | 2.494.400 | 1 | paket | 1.841.233 | 100 | 73,81 |
| 1 | 6 | 01 | 2,06 | 04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 1 | paket | 48.914.620 | 1 | paket | 38.336.845 | 100 | 78,38 |
| 1 | 6 | 01 | 2,06 | 05 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan | 2 | paket | 17.599.860 | 2 | paket | 15.328.970 | 100,00 | 87,10 |
| 1 | 6 | 01 | 2,06 | 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 4 | laporan | 30.735.400 | 4 | laporan | 27.417.901 | 100,00 | 89,21 |
| 1 | 6 | 01 | 2,07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah Aset / BMD yang diadakan | | 109.715.100 | | 104.000.000 | | | | |
| 1 | 6 | 01 | 2,07 | 06 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 6 | Unit | 109.715.100 | 6 | Unit | 104.000.000 | 100 | 94,79 |
| 1 | 6 | 01 | 2,08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah layanan jasa penunjang yang tersedia | | 93.700.000 | | 82.185.904 | | | | |
| 1 | 6 | 01 | 2,08 | 01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat | 1 | laporan | 1.800.000 | 1 | laporan | 1.800.000 | 100 | 100,00 |
| 1 | 6 | 01 | 2,08 | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 | laporan | 91.900.000 | 12 | laporan | 80.385.904 | 100 | 87,47 |
| 1 | 6 | 01 | 2,09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Aset BMD yang dipelihara | | 319.269.580 | | 308.047.014 | | | | |
| 1 | 6 | 01 | 2,09 | 01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 10 | unit | 3.000.000 | 9 | unit | 2.627.100 | 90,00 | 87,57 |
| 1 | 6 | 01 | 2,09 | 02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 8 | unit | 56.359.580 | 8 | unit | 53.815.900 | 100 | 95,49 |
| 1 | 6 | 01 | 2,09 | 06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 16 | unit | 9.910.000 | 14 | unit | 7.980.000 | 87,50 | 80,52 |
| 1 | 6 | 01 | 2,09 | 09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 2 | unit | 250.000.000 | 2 | unit | 243.624.014 | 100 | 97,45 |



| Kode | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024 (n-2) | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|--|----|-------------------------------|-----|-----------------------|----|-----|--|-----|--|-----|--|--|
| | | | Target Renja PD Tahun 2024 | | Realisasi Renja PD Tahun 2024 | | Tingkat Realisasi (%) | | | | | | | | |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | | | | | | |
| (1) | | | (2) | | | (3) | | | (6) | | (7) | | (8) | | |
| 1 | 6 | 02 | | | | | | | | | | | | | |
| PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 6 | 02 | 2.03 | | | | | | | | | | | | |
| Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 6 | 02 | 2.03 | 01 | | | | | | | | | | | |
| Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 6 | 04 | | | | | | | | | | | | | |
| PROGRAM REHABILITASI SOSIAL | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 6 | 04 | 2.01 | | | | | | | | | | | | |
| Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 6 | 04 | 2.01 | 01 | | | | | | | | | | | |
| Penyediaan Permakanan | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 6 | 04 | 2.01 | 02 | | | | | | | | | | | |
| Penyediaan Sandang | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 6 | 04 | 2.01 | 03 | | | | | | | | | | | |
| Penyediaan Alat Bantu | | | | | | | | | | | | | | | |



| Kode | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024 (n-2) | | | | | | | | | | | |
|------|---|---|--|----|--|---|-----------------------|-------|--------------------|------|-------|-------------------|--------|--------|
| | | | Target Renja PD Tahun 2024 | | Realisasi Renja PD Tahun 2024 | | Tingkat Realisasi (%) | | | | | | | |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | | | | | |
| | | | (6) | | (7) | | (8) | | | | | | | |
| 1 | 6 | 04 | 2,01 | 04 | Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota | 27 | Orang | 29.986.540 | 11 | Orang | 8.720.100 | 40,74 | 29,08 |
| 1 | 6 | 04 | 2,01 | 05 | Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial | Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota | 30 | Orang | 9.978.440 | 13 | Orang | 9.670.000 | 43,33 | 96,91 |
| 1 | 6 | 04 | 2,01 | 10 | Pemberian Layanan Kedaruratan | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota | 34 | Orang | 9.810.000 | 34 | Orang | 9.810.000 | 100,00 | 100,00 |
| 1 | 6 | 04 | 2,01 | 12 | Pemberian Layanan Rujukan | Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota | 14 | Orang | 9.810.000 | 9 | Orang | 5.172.000 | 64,29 | 52,72 |
| 1 | 6 | 04 | 2,02 | | Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial | Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya | | | 21.975.470 | | | 18.514.260 | | |
| 1 | 6 | 04 | 2,02 | 01 | Pemberian Layanan Data dan Pengaduan | Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota | 2000 | Orang | 21.975.470 | 1954 | Orang | 18.514.260 | 97,70 | 84,25 |
| 1 | 6 | 05 | | | PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL | Persentase perlindungan dan jaminan sosial yang dilayani | | | 102.777.045 | | | 81.578.940 | | |
| | | | | | Meningkatnya Perlindungan dan Jaminan Sosial | Persentase Penerima Manfaat yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar (Persentase) | | | 102.777.045 | | | 81.578.940 | | |
| 1 | 6 | 05 | 2,02 | | Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Data fakir miskin yang di muktahirkan | | | 102.777.045 | | | 81.578.940 | | |
| 1 | 6 | 05 | 2,02 | 01 | Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata | 10000 | Orang | 46.199.585 | 8473 | Orang | 37.474.940 | 84,73 | 81,12 |
| 1 | 6 | 05 | 2,02 | 03 | Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga | Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota | 3073 | Orang | 36.592.500 | 3073 | Orang | 36.274.000 | 100 | 99,13 |
| 1 | 6 | 05 | 2,02 | 04 | Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat | Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota | 9460 | Orang | 19.984.960 | 3840 | Orang | 7.830.000 | 40,59 | 39,18 |



| Kode | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024 (n-2) | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|----|-------------------------------|------------|-----------------------|------------|-----|---------|------------|--------|-------|--|--|
| | | | Target Renja PD Tahun 2024 | | Realisasi Renja PD Tahun 2024 | | Tingkat Realisasi (%) | | | | | | | | |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | | | | | | |
| (1) | | | (2) | | | (3) | | | (6) | | (7) | | (8) | | |
| 1 | 6 | 06 | | | | | | | | | | | | | |
| PROGRAM PENANGANAN BENCANA | | | Persentase layanan penanganan bencana alam dan sosial | | | 49.990.000 | | 14.950.000 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| Meningkatnya Perlindungan Sosial Korban Bencana | | | Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota (%) | | | 49.990.000 | | 14.950.000 | | | | | | | |
| 1 | 6 | 06 | 2,01 | | | | | | | | | | | | |
| Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota | | | Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah | | | 49.990.000 | | 14.950.000 | | | | | | | |
| 1 | 6 | 06 | 2,01 | 01 | | | | | | | | | | | |
| Penyediaan Makanan | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota | | | 298 | Orang | 49.990.000 | 99 | Orang | 14.950.000 | 33,22 | 29,91 | | |
| 1 | 6 | 07 | | | | | | | | | | | | | |
| PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN | | | Persentase layanan pengelolaan taman makam pahlawan | | | 76.945.900 | | 74.407.200 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| Meningkatnya Tatakelola Taman Makam Pahlawan | | | Persentase layanan pengelolaan taman makam pahlawan (%) | | | 76.945.900 | | 74.407.200 | | | | | | | |
| 1 | 6 | 07 | 2,01 | | | | | | | | | | | | |
| Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota | | | Jumlah Taman Makam Pahlawan yang dipelihara | | | 76.945.900 | | 74.407.200 | | | | | | | |
| 1 | 6 | 07 | 2,01 | 02 | | | | | | | | | | | |
| Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota | | | Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharaannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota | | | 1 | Makam | 76.945.900 | 1 | Makam | 74.407.200 | 100,00 | 96,70 | | |
| 2 | 13 | 04 | | | | | | | | | | | | | |
| PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA | | | Kategori kelurahan | | | 43.885.410 | | 37.754.909 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| Meningkatnya Kualitas Pembinaan dan Pengawasan Kelurahan | | | Kategori kelurahan | | | 43.885.410 | | 37.754.909 | | | | | | | |
| 2 | 13 | 04 | 2,01 | | | | | | | | | | | | |
| Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa | | | Jumlah Pembinaan Kelurahan | | | 43.885.410 | | 37.754.909 | | | | | | | |
| 2 | 13 | 04 | 2,01 | 18 | | | | | | | | | | | |
| Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan | | | Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan | | | 2 | Dokumen | 43.885.410 | 2 | Dokumen | 37.754.909 | 100,00 | 86,03 | | |



| Kode | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024 (n-2) | | | | | | | | | | | | |
|------|---|---|--|----|---|--|-----------------------|-------------|---------------|----|-------------|---------------|--------|--------|--|
| | | | Target Renja PD Tahun 2024 | | Realisasi Renja PD Tahun 2024 | | Tingkat Realisasi (%) | | | | | | | | |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | | | | | | |
| (1) | | | (2) | | | (3) | | | (6) | | (7) | | (8) | | |
| 2 | 13 | 05 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 13 | 05 | 2,01 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 13 | 05 | 2,01 | 03 | Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya | 76 | Lemba ga | 484.069.410 | 76 | Lembag a | 205.598.657 | 100,00 | 42,47 | |
| 2 | 13 | 05 | 2,01 | 04 | Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat | 10 | Unit | 969.062.340 | 10 | Unit | 930.457.023 | 100,00 | 96,02 | |
| 2 | 13 | 05 | 2,01 | 05 | Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa | 1 | Dokum en | 24.999.800 | 1 | Dokum en | 16.032.420 | 100,00 | 64,13 | |
| 2 | 13 | 05 | 2,01 | 06 | Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna | 1 | Lapora n | 62.752.730 | 1 | Laporan | 52.362.170 | 100,00 | 83,44 | |
| 2 | 13 | 05 | 2,01 | 09 | Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga | 25 | Dokum en | 1.100.000.000 | 25 | Dokum en | 1.100.000.000 | 100,00 | 100,00 | |



Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2024 berdasarkan target Indikator Kinerja Program Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program ini memiliki anggaran sebesar Rp 4.182.237.871,- yang dialokasikan untuk 5 (lima) kegiatan dan 13 (tiga belas) sub kegiatan dengan realisasi penyerapan sebesar Rp 3.748.261.456,-. Adapun kegiatan yang dilaksanakan yaitu sebagai berikut :

- a. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 2. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
- b. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 2. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 3. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 4. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Konsultasi SKPD
- c. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 1. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- d. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- e. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 3. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 4. Pemeliharaan Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

Berdasarkan data yang disajikan pada Tabel 1 dapat diketahui bahwa tingkat capaian realisasi target renstra pada program ini mencapai 99,19 % dengan 5 (lima) kegiatan.



2. Program Pemberdayaan Sosial

Program ini memiliki anggaran sebesar Rp 99.836.580,- yang dialokasikan untuk 1 (satu) kegiatan dan 1 (satu) sub kegiatan dengan realisasi penyerapan sebesar Rp 68.043.001,-. Adapun kegiatan yang dilaksanakan yaitu :

- a. Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota
 1. Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota

Berdasarkan data yang disajikan pada Tabel 1 dapat diketahui bahwa tingkat capaian realisasi target renstra pada program ini mencapai 87,41 % dengan 1 (satu) kegiatan.

3. Program Rehabilitasi Sosial

Program ini memiliki anggaran sebesar Rp 197.002.120,- yang dialokasikan untuk 2 (dua) kegiatan dan 8 (delapan) sub kegiatan dengan realisasi penyerapan sebesar Rp 157.278.840,-. Adapun kegiatan yang dilaksanakan yaitu :

- a. Rehabilitasi Sosial dasar Penyandang Disabilitas Terlantar Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial
 1. Penyediaan Permakanan
 2. Penyediaan Sandang
 3. Penyediaan Alat Bantu
 4. Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga
 5. Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial
 6. Pemberian Layanan Kedaruratan
 7. Pemberian Layanan Rujukan
- b. Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial
 1. Pemberian Layanan Data dan Pengaduan

Berdasarkan data yang disajikan pada Tabel 2.1 dapat diketahui bahwa tingkat capaian realisasi target renstra pada program ini mencapai 87,11 % dengan 8 (delapan) kegiatan.



4. Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial

Program ini memiliki anggaran sebesar Rp 102.777.045,- yang dialokasikan untuk 1 (satu) kegiatan dan 3 (tiga) sub kegiatan dengan realisasi penyerapan sebesar Rp 81.578.940,-. Adapun kegiatan yang dilaksanakan yaitu :

- a. Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
 1. Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
 2. Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga
 3. Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat

Berdasarkan data yang disajikan dapat diketahui bahwa tingkat capaian realiasi pada program ini sebesar 83,86%.

5. Program Penanganan Bencana

Program ini memiliki anggaran sebesar Rp 49.990.000,- yang dialokasikan untuk 1 (satu) kegiatan dan 1 (satu) sub kegiatan dengan realisasi penyerapan sebesar Rp 14.950.000,-. Adapun kegiatan yang dilaksanakan yaitu :

- a. Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota
 1. Penyediaan Makanan

Berdasarkan data yang disajikan pada Tabel 1 dapat diketahui bahwa tingkat capaian realisasi target renstra pada program ini mencapai 60,91 % dengan 1 (satu) kegiatan.

6. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan

Program ini memiliki anggaran sebesar Rp 76.945.900,- yang dialokasikan untuk 1 (satu) kegiatan dan 1 (satu) sub kegiatan dengan realisasi penyerapan sebesar Rp 74.407.200,-. Adapun kegiatan yang dilaksanakan yaitu :

- a. Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota
 1. Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota

Berdasarkan data yang disajikan pada Tabel 1 dapat diketahui bahwa tingkat



capaian realisasi target renstra pada program ini mencapai 100 % dengan 1 (satu) kegiatan.

7. Program Administrasi Pemerintahan Desa

Program ini memiliki anggaran sebesar Rp 43.885.410,- yang dialokasikan untuk 1 (satu) kegiatan dan 1 (satu) sub kegiatan dengan realisasi penyerapan sebesar Rp 37.754.909,-. Adapun kegiatan yang dilaksanakan yaitu :

- a. Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa
 1. Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan

Berdasarkan data yang disajikan pada Tabel 1 dapat diketahui bahwa tingkat capaian realisasi target renstra pada program ini mencapai 100 % dengan 1 (satu) kegiatan.

8. Program Program Pemberdayaan Lembaga, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat

Program ini memiliki anggaran sebesar Rp 2.640.884.280,- yang dialokasikan untuk 1 (satu) kegiatan dan 5 (lima) sub kegiatan dengan realisasi penyerapan sebesar Rp 2.304.450.270,-. Adapun kegiatan yang dilaksanakan yaitu :

- a. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota
 1. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat
 2. Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat



3. Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa
4. Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna
5. Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga

Berdasarkan data yang disajikan dapat diketahui bahwa tingkat capaian realiasi pada program ini sebesar 90%.

2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat berdasarkan indikator yang telah ditetapkan pada periode sebelumnya yang mengacu kepada uraian tugas pokok, fungsi dan struktur organisasi, pelaksanaan kapasitas pelayanan Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat. Keberhasilan kinerja perangkat daerah dapat dilihat dari pencapaian indikator yang telah ditetapkan. Keberhasilan kinerja pelayanan Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat dapat dilihat pada tabel 2 berikut ini :



Tabel 2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat
Kota Tarakan

| No | Indikator | Target Renstra | | | | Realisasi Capaian | | Proyeksi | | Catatan Analisis |
|----|---|----------------|--------|--------|--------|-------------------|---------|----------|--------|------------------|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| 1 | Persentase PPKS yang memperoleh bantuan Sosial | 82,00% | 84,00% | 55,25% | 55,88% | 95,43% | 85,00% | 55,25% | 55,88% | |
| 2 | Indeks kepuasan pengunjung TMP | 100% | Puas | 75,45 | 76,15 | 100% | Puas | 75,45 | 76,15 | |
| 3 | Persentase lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam pembangunan yang inovatif | 100% | 100% | 8,92% | 14,39% | 98,41% | 100% | 8,92% | 14,39% | |
| 4 | Nilai SAKIP | 70,00% | 72% BB | 70,01% | 70,26% | 60,06%B | 67,65%B | 70,01% | 70,26% | |
| 5 | Nilai IKM | - | - | 84,94% | 85,43% | - | - | 84,94% | 85,43% | |



2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH

Berdasarkan identifikasi analisis terhadap kinerja pelayanan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan, permasalahan dan hambatan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi, capaian terhadap Tujuan dan sasaran Daerah, capaian program nasional, tantangan dan peluang maka ditentukan isu strategis Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan.

Isu-isu penting merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan dalam perencanaan pembangunan, karena dampaknya yang signifikan bagi Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan. Perumusan isu- isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan, dimaksudkan untuk menentukan permasalahan dan hambatan atas pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan. Dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, guna pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah sebagaimana yang dituangkan pada RPJMD, Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan senantiasa dipengaruhi oleh isu-isu penting yang bersifat strategis, baik berupa kondisi, keadaan, atau peristiwa yang dampaknya dapat mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.

Adapun permasalahan, hambatan, tantangan dan peluang tersebut adalah sebagai berikut :

1. Kekuatan

- a. Tersedianya kerangka regulasi yang mengatur masalah sosial dan kelembagaan masyarakat.
- b. Adanya komitmen pimpinan dan seluruh aparatur untuk meningkatkan dan membuka akses peningkatan sosial dan pemberdayaan masyarakat.
- c. Tersedianya SDM dalam Bidang Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat.

2. Kelemahan

- a. Belum optimalnya tentang upaya-upaya dalam peningkatan sosial dan pemberdayaan masyarakat.
- b. Belum optimalnya kinerja SDM Bidang Kesejahteraan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat.
- c. Masih terbatasnya sarana dan akses dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

3. Peluang

- a. Adanya perkembangan teknologi informasi.
 - b. Penambahan kelengkapan sarana dan prasarana teknologi informasi.
 - c. Pembenahan pada sumber daya manusia dan jumlah personil yang terus ditingkatkan untuk dapat mendukung kebutuhan pembangunan di Bidang Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat.
4. Ancaman
- a. Krisis ekonomi global yang berpengaruh pada kehidupan sosial masyarakat saat ini;
 - b. Rusaknya ekosistem lingkungan hidup yang mengakibatkan bencana alam dan sosial;
 - c. Tumpang tindihnya kebijakan pada program kebijakan daerah dan program dekonsentrasi;
 - d. Menurunnya kesadaran serta kepedulian masyarakat dalam pembangunan sosial dan pemberdayaan masyarakat.

2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Rencana awal RKPD Tahun 2026 merupakan pedoman bagi Perangkat Daerah (PD) dalam menyusun Rancangan Renja Kerja Perangkat Daerah (Rancangan Renja-SKPD) Tahun 2026. Rancangan awal RKPD Tahun 2026 digunakan sebagai kerangka awal dalam mengajukan usulan Musrenbang Tahun Anggaran 2025. Setelah Peraturan Wali Kota Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) ditetapkan, maka setiap OPD wajib menyesuaikan Rancangan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026.

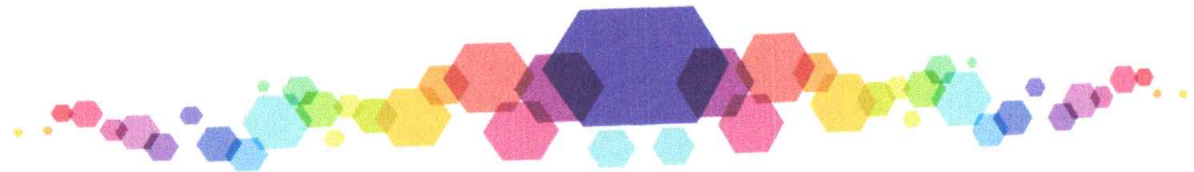
Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat sesuai dengan tugasnya untuk menyelenggarakan urusan penunjang pemerintahan daerah di bidang Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat menyusun rancangan kerja berdasarkan RPD Kota Tarakan.

Review terhadap rancangan awal RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan, dengan arahan Kepala Daerah terkait prioritas program dan kegiatan dan pagu indikatif yang disediakan untuk Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat.

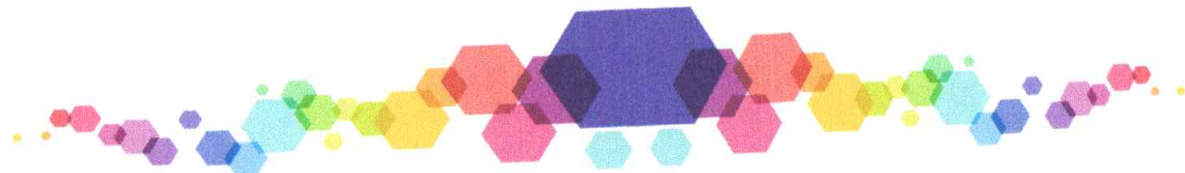
Review terhadap rancangan awal RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) dapat dijabarkan pada Tabel 3 dibawah ini :

Tabel 3
Review terhadap Rencana Kerja Murni Tahun 2026
Kota Tarakan

| Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat | | | | | Rancangan Awal Tahun 2026 | | | | Rancangan Tahun 2026 | | | | ANALISA KEBUTUHAN | CATATAN PENTING | KETRANGAN | |
|--|---|--|--|--------|---------------------------|---|---|------------|----------------------|---|---|------------|-------------------|---|-----------|--------------|
| Kode | | Urusan/Bidang Urusan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | TARGET | Pagu Indikatif (Rp) | Urusan/Bidang Urusan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | TARGET | Pagu Indikatif (Rp) | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | | | |
| | | | | | 11.812.083.698,00 | | | | 11.812.083.698,00 | | | | | | | |
| | | | | | 7.730.796.698,00 | | | | 7.730.796.698,00 | | | | | | | |
| | | | | | 5.890.147.158,00 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL | | | 5.890.147.158,00 | | Program | | | | | |
| 1 | 6 | | | | 5.890.147.158,00 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | | | | | | | | | |
| 1 | 6 | 01 | | | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi yang tersedia | 3 Dokumen | 8.940.000,00 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi yang tersedia | 3 Dokumen | 8.940.000,00 | | | Kegiatan |
| 1 | 6 | 01 | 2,01 | 0006 | | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan) | 3 Laporan | 1.980.000,00 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan) | 3 Laporan | 1.980.000,00 | Nasi kotak termasuk air mineral gelas dan snack kotak minuman rapat koordinasi penyusunan Lkip dengan perangkat daerah terkait (oransi, bappeda litbang, pegawai dinstospm) Rp.60.000,- X 33 Porsi | | Sub Kegiatan |
| 1 | 6 | 01 | 2,01 | 0007 | | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan) | 3 Laporan | 1.980.000,00 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan) | 3 Laporan | 1.980.000,00 | Nasi kotak termasuk air mineral gelas dan snack kotak minuman rapat koordinasi penyusunan Lkip, Pengukuran Kinerja, SPIP terintegrasi Rp.60.000,- X 33 Porsi | | Sub Kegiatan |
| 1 | 6 | 01 | 2,01 | 0008 | | Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah | Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen) | 3 Dokumen | 4.980.000,00 | Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah | Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen) | 3 Dokumen | 4.980.000,00 | Nasi kotak termasuk air mineral gelas dan snack kotak minuman rapat koordinasi penyusunan data capaian kinerja perangkat daerah (Bappeda litbang, BPS, DKISP, dan pegawai dinstospm) Rp.60.000,- X 83 Porsi | | Sub Kegiatan |
| 1 | 6 | 01 | 2,02 | | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Jumlah layanan Administrasi Keuangan yang diselesaikan tepat waktu | 2 Layanan | 5.032.552.648,00 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Jumlah layanan Administrasi Keuangan yang diselesaikan tepat waktu | 2 Layanan | 5.032.552.648,00 | | | Kegiatan |
| 1 | 6 | 01 | 2,02 | 0001 | | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan) | 52 Orang/b | 4.970.496.648,00 | 1.06.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan) | 52 Orang/b | 4.970.496.648,00 | Penyediaan gaji dan tunjangan TPP, Uang Makan ASN sebanyak 20 pegawai dan Penyediaan gaji dan tunjangan TPP, Uang Makan PPPK sebanyak 32 pegawai | | Sub Kegiatan |
| 1 | 6 | 01 | 2,02 | 0002 | | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen) | 4 Dokumen | 62.056.000,00 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen) | 4 Dokumen | 62.056.000,00 | Honorarium PPKom, bendahara, pembantu bendahara, bendahara barang, PPTK, PPK, Operator SIPD | | Sub Kegiatan |



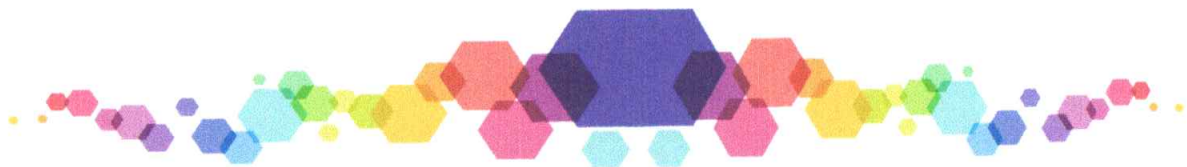
| Rancangan Awal Tahun 2026 | | | | | Rancangan Tahun 2026 | | | | | ANALISA KEBUTUHAN | CATATAN PENTING | KETRANGAN |
|---------------------------|------|--|--|---|----------------------|--|--|---|---------------------|-------------------|---|--------------|
| Kode | | Urusan/Bidang Urusan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | TARGET | Pagu Indikatif (Rp) | Urusan/Bidang Urusan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | TARGET | Pagu Indikatif (Rp) | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 1 | 6.01 | 2,05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Tersedianya layanan administrasi Kepegawaian | 1 Laporan | 47.125.000,00 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Tersedianya layanan administrasi Kepegawaian | 1 Laporan | 47.125.000,00 | | Kegiatan |
| 1 | 6.01 | 2,05 | 0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket) | 1 Paket | 47.125.000,00 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket) | 1 Paket | 47.125.000,00 | Pakaian dinas ASN : 20 Pegawai dan Pakaian dinas PPPK : 32 Pegawai | Sub Kegiatan |
| 1 | 6.01 | 2,06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah layanan administrasi umum yang terlaksana | 6 Layanan | 217.009.380,00 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah layanan administrasi umum yang terlaksana | 6 Layanan | 217.009.380,00 | | Kegiatan |
| 1 | 6.01 | 2,06 | 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket) | 1 Paket | 4.978.700,00 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket) | 1 Paket | 4.978.700,00 | Alat listrik/penerangan kantor : Baterai A2,Baterai A3,baterai kotak, bola lampu (18,11,42,23 watt), kabel, stop kontak, lampu LED | Sub Kegiatan |
| 1 | 6.01 | 2,06 | 0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket) | 1 Paket | 3.000.000,00 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket) | 1 Paket | 3.000.000,00 | Belanja dispenseer | Sub Kegiatan |
| 1 | 6.01 | 2,06 | 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket) | 2 Paket | 72.340.280,00 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket) | 2 Paket | 72.340.280,00 | Bahan kebersihan, Alat Tulis Kantor, perabot kantor (bendera plastik sampah), racun rumput, jasa pungut sampah | Sub Kegiatan |
| 1 | 6.01 | 2,06 | 0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket) | 1 Paket | 23.750.000,00 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket) | 1 Paket | 23.750.000,00 | Foto copy, pengganda, penjilidan, spanduk | Sub Kegiatan |
| 1 | 6.01 | 2,06 | 0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan) | 4 Laporan | 6.000.000,00 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan) | 4 Laporan | 6.000.000,00 | Nasi kotak termasuk air mineral dan snack kotak dan minuman untuk tamu Rp.60.000,- X 100 Porsi | Sub Kegiatan |
| 1 | 6.01 | 2,06 | 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan) | 23 Laporan | 106.940.400,00 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan) | 23 Laporan | 106.940.400,00 | Perjalanan Dinas Luar Provinsi Eselon II dan dalam Provinsi Eselon II, Perjalanan Dinas dalam provinsi Eselon III, IV, dan Non eselon | Sub Kegiatan |
| 1 | 6.01 | 2,07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah aset/BMD yang diadakan | 8 Jenis | 321.966.500,00 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah aset/BMD yang diadakan | 8 Jenis | 321.966.500,00 | | Kegiatan |
| 1 | 6.01 | 2,07 | 0005 Pengadaan Mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit) | 10 Unit | 100.000.000,00 | Pengadaan Mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit) | 10 Unit | 100.000.000,00 | Kursi kerja,Meja Kerja 1/2 Biro,Kursi putar,Meja Kerja Pejabat,Kursi Kerja Pejabat,Lemari arsip | Sub Kegiatan |
| 1 | 6.01 | 2,07 | 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit) | 35 Unit | 161.966.500,00 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit) | 35 Unit | 161.966.500,00 | Pengadaan kendaraan roda dua | Sub Kegiatan |
| 1 | 6.01 | 2,07 | 00010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit) | 5 Unit | 60.000.000,00 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit) | 5 Unit | 60.000.000,00 | Laptop, komputer,scaner,ac | Sub Kegiatan |



| Kode | Rancangan Awal Tahun 2026 | | | | | Rancangan Tahun 2026 | | | | ANALISA KEBUTUHAN | CATATAN PENTING | KETRANGAN | | | |
|------|--|----|--|--------|---|---|--|----------------|--|---|-----------------|----------------|--|--|--------------|
| | Urusan/Bidang Urusan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | | Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | TARGET | Pagu Indikatif (Rp) | Urusan/Bidang Urusan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | TARGET | Pagu Indikatif (Rp) | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | | | | |
| 1 | 6 | 01 | 2,08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Tersedianya layanan jasa penunjang | 2 Layanan | 103.700.000,00 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Tersedianya layanan jasa penunjang | 2 Layanan | 103.700.000,00 | | | Kegiatan |
| 1 | 6 | 01 | 2,08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan) | 1 Laporan | 1.800.000,00 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan) | 1 Laporan | 1.800.000,00 | Penyediaan material | | Sub Kegiatan |
| 1 | 6 | 01 | 2,08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) | 12 Laporan | 101.900.000,00 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) | 12 Laporan | 101.900.000,00 | Tagihan air, listrik, telepon, internet | | Sub Kegiatan |
| 1 | 6 | 01 | 2,09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah aset/BMD yang dipelihara | 68 Unit | 158.853.630,00 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah aset/BMD yang dipelihara | 68 Unit | 158.853.630,00 | | | Kegiatan |
| 1 | 6 | 01 | 2,09 | 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit) | 2 Unit | 65.560.000,00 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit) | 2 Unit | 65.560.000,00 | Pembayaran pajak kendaraan roda 4, service kendaraan dan BBM roda 4 | | Sub Kegiatan |
| 1 | 6 | 01 | 2,09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit) | 15 Unit | 78.023.630,00 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit) | 15 Unit | 78.023.630,00 | Pembayaran pajak kendaraan dinas roda 4 dan 2, service/pemeliharaan dan BBM kendaraan roda 4 dan 2 | | Sub Kegiatan |
| 1 | 6 | 01 | 2,09 | 00010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) | 50 Unit | 15.270.000,00 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) | 50 Unit | 15.270.000,00 | Service/pemeliharaan komputer/laptop, printer dan AC | | Sub Kegiatan |
| 1 | 6 | 02 | | | PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL | Persentase PSKS yang Meningkatkan Kompetensinya dalam Pelayanan Sosial (%) | 100% | 84.016.700,00 | PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL | Persentase PSKS yang Meningkatkan Kompetensinya dalam Pelayanan Sosial (%) | 100% | 84.016.700,00 | | | Program |



| Kode | | | | Rancangan Awal Tahun 2026 | | | | | Rancangan Tahun 2026 | | | | | ANALISA KEBUTUHAN | CATATAN PENTING | KETRANGAN |
|------|---|----|------|---|---|---|---------------------|---|--|---|---------------------|---------------|--|-------------------|-----------------|-----------|
| | | | | Unsur/Bidang Urusan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | TARGET | Pagu Indikatif (Rp) | Unsur/Bidang Urusan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | TARGET | Pagu Indikatif (Rp) | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | |
| 1 | 6 | 02 | 2,02 | | Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang (Dokumen) | 6 Izin | 10.000.000,00 | Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang (Dokumen) | 6 Izin | 10.000.000,00 | | | Kegiatan | |
| 1 | 6 | 02 | 2,02 | 0003 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang (Dokumen) | 1 Dokumen | 10.000.000,00 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang (Dokumen) | 1 Dokumen | 10.000.000,00 | Makan dan snack sosialisasi UGB,honor narasumber,spanduk,perjalanan dinas konsumsi | | Sub Kegiatan | |
| 1 | 6 | 02 | 2,03 | | Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah potensi Sumber Daya Kesejahteraan Sosial | 3 Dokumen | 74.016.700,00 | Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah potensi Sumber Daya Kesejahteraan Sosial | 3 Dokumen | 74.016.700,00 | | | Kegiatan | |
| 1 | 6 | 02 | 2,03 | 0003 | Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota (Keluarga) | 4 Keluarga | 6.000.000,00 | Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota (Keluarga) | 4 Keluarga | 6.000.000,00 | Spanduk,makan dan snack,honor narasumber | | Sub Kegiatan | |
| 1 | 6 | 02 | 2,03 | 0004 | Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota (Lembaga) | 14 Lembaga | 3.600.000,00 | Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota (Lembaga) | 14 Lembaga | 3.600.000,00 | Kegiatan LKSK,LKS makan dan snack | | Sub Kegiatan | |
| 1 | 6 | 02 | 2,03 | 00012 | Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Lembaga dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) | Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) yang mendapatkan Peningkatan Kapasitas dan fasilitasi dalam penanganan kasus Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang) | 20 Orang | 20.000.000,00 | Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) | Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) yang mendapatkan Peningkatan Kapasitas dan fasilitasi dalam penanganan kasus Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang) | 20 Orang | 20.000.000,00 | Spanduk, makan dan snack LK3 | | Sub Kegiatan | |



| Kode | Rancangan Awal Tahun 2026 | | | | Rancangan Tahun 2026 | | | | ANALISA KEBUTUHAN | CATATAN PENTING | KETRANGAN |
|-------------------|--|---|-----------|---------------------|--|---|-----------|---------------------|--|-----------------|--------------|
| | Urusan/Bidang Urusan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | TARGET | Pagu Indikatif (Rp) | Urusan/Bidang Urusan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | TARGET | Pagu Indikatif (Rp) | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | 6 |
| 1.6.02.2.03.00014 | Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Penyuluh Sosial, Penyuluh Sosial Masyarakat, Pekerja Sosial, Pekerja Sosial Masyarakat dan/atau Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang Meningkatkan Kapasitasnya (Orang) | 124 Orang | 44.416.700,00 | Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Penyuluh Sosial, Penyuluh Sosial Masyarakat, Pekerja Sosial, Pekerja Sosial Masyarakat dan/atau Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang Meningkatkan Kapasitasnya (Orang) | 124 Orang | 44.416.700,00 | Spanduk, makan dan snack, honor narasumber, Perjalanan dinas luar dan dalam provinsi | | Sub Kegiatan |
| 1.6.04 | PROGRAM REHABILITASI SOSIAL | Persentase penyandang disabilitas, Anak Terlantar, Lanjut Usia terlantar serta gelandangan pengemis terlantar di luar panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (%) | 100% | 266.865.840,00 | PROGRAM REHABILITASI SOSIAL | Persentase penyandang disabilitas, Anak Terlantar, Lanjut Usia terlantar serta gelandangan pengemis terlantar di luar panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (%) | 100% | 266.865.840,00 | | | Program |
| 1.6.04.2.01 | Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial | Jumlah penyandang disabilitas, Anak Terlantar, Lanjut Usia terlantar serta gelandangan pengemis terlantar di luar panti yang di jangkau | 374 Orang | 266.865.840,00 | Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial | Jumlah penyandang disabilitas, Anak Terlantar, Lanjut Usia terlantar serta gelandangan pengemis terlantar di luar panti yang di jangkau | 374 Orang | 266.865.840,00 | | | Kegiatan |
| 1.6.04.2.01.0001 | Penyediaan Permakanan | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang) | 200 Orang | 49.956.420,00 | Penyediaan Permakanan | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang) | 200 Orang | 49.956.420,00 | SPM, orang terlantar makan minum di shelter | | Sub Kegiatan |
| 1.6.04.2.01.0002 | Penyediaan Sandang | Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang) | 10 Orang | 10.000.000,00 | Penyediaan Sandang | Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang) | 10 Orang | 10.000.000,00 | SPM, orang terlantar di shelter | | Sub Kegiatan |
| 1.6.04.2.01.0003 | Penyediaan Alat Bantu | Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang) | 22 Orang | 100.000.000,00 | Penyediaan Alat Bantu | Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang) | 22 Orang | 100.000.000,00 | SPM, kursi roda, tongkat, kacamata, dan alat dengar | | Sub Kegiatan |
| 1.6.04.2.01.0004 | Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang) | 25 Orang | 45.000.000,00 | Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang) | 25 Orang | 45.000.000,00 | SPM, pemulangan orang terlantar tiket pesawat, kapal laut dan transport darat | | Sub Kegiatan |
| 1.6.04.2.01.0005 | Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial | Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang) | 64 Orang | 12.000.000,00 | Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial | Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang) | 64 Orang | 12.000.000,00 | SPM, Spanduk, makan dan snack kegiatan, Honor barasumber | | Sub Kegiatan |



| Kode | Rancangan Awal Tahun 2026 | | | | Rancangan Tahun 2026 | | | | ANALISA KEBUTUHAN | CATATAN PENTING | KETRANGAN | | |
|------|--|--|--------|--|---|--|------------------|--|---|-----------------|------------------|---|--------------|
| | Usuran/Bidang Usuran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | TARGET | Pagu Indikatif (Rp) | Usuran/Bidang Usuran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | TARGET | Pagu Indikatif (Rp) | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | 6 | | |
| 1 | 6 04 | 2,01 | 0009 | Pemberian Layanan Data dan Pengaduan | Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang) | 2.600 Orang | 10.000.000,00 | Pemberian Layanan Data dan Pengaduan | Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang) | 2.600 Orang | 10.000.000,00 | SPM, foto copy pengandaan,makan dan snack | Sub Kegiatan |
| 1 | 6 04 | 2,01 | 00010 | Pemberian Layanan Kedaruratan | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang) | 24 Orang | 30.000.000,00 | Pemberian Layanan Kedaruratan | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang) | 24 Orang | 30.000.000,00 | Paket kebutuhan anak, keperluan kotak P3K | Sub Kegiatan |
| 1 | 6 04 | 2,01 | 00012 | Pemberian Layanan Rujukan | Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang) | 5 Orang | 9.909.420,00 | Pemberian Layanan Rujukan | Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang) | 5 Orang | 9.909.420,00 | Rujukan orang terlanjar ke PSTW marga rahayu,pendampingan rujukan oarg terlanjar, perjalanan dinas ke provinsi | Sub Kegiatan |
| 1 | 6 05 | | | PROGRAM PERLUNDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL | Persentase Penerima Manfaat yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar (Persentase) | 30% | 1.297.777.000,00 | PROGRAM PERLUNDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL | Persentase Penerima Manfaat yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar (Persentase) | 30% | 1.297.777.000,00 | | Program |
| 1 | 6 05 | 2,02 | | Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Data fakir miskin yang di muktahirkan | 2022 KPM | 1.297.777.000,00 | Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Data fakir miskin yang di muktahirkan | 2022 KPM | 1.297.777.000,00 | | Kegiatan |
| 1 | 6 05 | 2,02 | 0001 | Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata (Orang) | 2.022 Orang | 85.000.000,00 | Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata (Orang) | 2.022 Orang | 85.000.000,00 | Penggandaan form asesment, makan dan snack monev bansos APBD dan APBN,perjalanan dinas dalam provinsi dan luar provinsi terkait DTSEN | Sub Kegiatan |
| 1 | 6 05 | 2,02 | 0004 | Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat | Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang) | 10 Orang | 50.000.000,00 | Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat | Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang) | 10 Orang | 50.000.000,00 | | Sub Kegiatan |
| 1 | 6 05 | 2,02 | 0006 | Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga | Jumlah Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang) | 3.447 Orang | 53.977.000,00 | Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga | Jumlah Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang) | 3.447 Orang | 53.977.000,00 | Peningkatan P2K2 makan dan snack,bantuan bangan resiko stunting(KPM/PKH/BPNT),fotocopy | Sub Kegiatan |
| 1 | 6 05 | 2,02 | 0009 | Fasilitasi Bantuan Jaminan Sosial bagi Pekerja Rentan Miskin | Jumlah Pekerja Rentan Miskin yang Mendapatkan Bantuan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang) | 5.909 Orang | 1.108.800.000,00 | Fasilitasi Bantuan Jaminan Sosial bagi Pekerja Rentan Miskin | Jumlah Pekerja Rentan Miskin yang Mendapatkan Bantuan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang) | 5.909 Orang | 1.108.800.000,00 | | Sub Kegiatan |
| 1 | 6 06 | | | PROGRAM PENANGANAN BENCANA | Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota (%) | 100% | 114.990.000,00 | PROGRAM PENANGANAN BENCANA | Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota (%) | 100% | 114.990.000,00 | | Program |

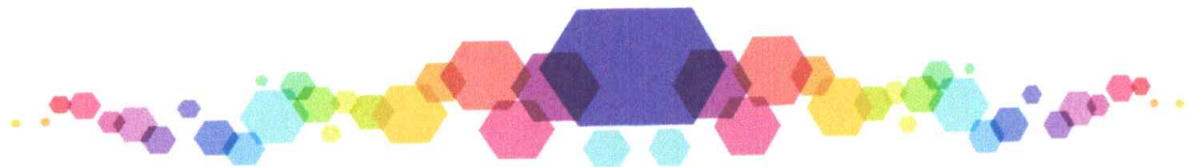
| Kode | Rancangan Awal Tahun 2026 | | | | | Rancangan Tahun 2026 | | | | | CATATAN PENTING | KETRANGAN | |
|------|--|------|--|---|---|--|------------------|---|---|---------------------|------------------|--|-------------------|
| | Urusan/Bidang Urusan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | | Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | TARGET | Pagu Indikatif (Rp) | Urusan/Bidang Urusan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | | Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | TARGET | Pagu Indikatif (Rp) | | | ANALISA KEBUTUHAN |
| | 1 | 2,01 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | |
| 1 | 6 06 | 2,01 | | Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota | Persentase layanan penanganan bencana alam dan sosial | 100% | 54.990.000,00 | Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota | Persentase layanan penanganan bencana alam dan sosial | 100% | 54.990.000,00 | | Kegiatan |
| 1 | 6 06 | 2,01 | 0001 | Penyediaan Makanan | Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang) | 298 Orang | 49.990.000,00 | Penyediaan Makanan | Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang) | 298 Orang | 49.990.000,00 | Nasi bungkus penyintas korban bencana,paket kebutuhan dapur dan sembako | Sub Kegiatan |
| 1 | 6 06 | 2,01 | 0005 | Pelayanan Dukungan Psikososial | Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang) | 100 Orang | 5.000.000,00 | Pelayanan Dukungan Psikososial | Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang) | 100 Orang | 5.000.000,00 | Paket kebutuhan korban bencana | Sub Kegiatan |
| 1 | 6 06 | 2,02 | | Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota | Jumlah penyelenggaraan pemberdayaan Masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana | | 60.000.000,00 | Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota | Jumlah penyelenggaraan pemberdayaan Masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana | | 60.000.000,00 | | Kegiatan |
| 1 | 6 06 | 2,02 | 0002 | Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana | Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang) | 64 Orang | 30.000.000,00 | Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana | Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang) | 64 Orang | 30.000.000,00 | Pengambilan logistik TAGANA ke dinsos provinsi,perjalanan dinas dalam provinsi | Sub Kegiatan |
| 1 | 6 06 | 2,02 | 0003 | Peningkatan Kapasitas Relawan Taruna Siaga Bencana Tingkat Muda | Jumlah Relawan Taruna Siaga Bencana Tingkat Muda yang Meningkatkan Kapasitasnya (Orang) | 64 Orang | 30.000.000,00 | Peningkatan Kapasitas Relawan Taruna Siaga Bencana Tingkat Muda | Jumlah Relawan Taruna Siaga Bencana Tingkat Muda yang Meningkatkan Kapasitasnya (Orang) | 64 Orang | 30.000.000,00 | | Sub Kegiatan |
| 1 | 6 07 | | | PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN | Persentase layanan pengelolaan taman makam pahlawan (%) | 100% | 77.000.000,00 | PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN | Persentase layanan pengelolaan taman makam pahlawan (%) | 100% | 77.000.000,00 | | Program |
| 1 | 6 07 | 2,01 | | Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota | Jumlah Taman Makam Pahlawan yang dipelihara | 1 TMP | 77.000.000,00 | Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota | Jumlah Taman Makam Pahlawan yang dipelihara | 1 TMP | 77.000.000,00 | | Kegiatan |
| 1 | 6 07 | 2,01 | 0002 | Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota | Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota (Makam | 1 Makam | 77.000.000,00 | Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota | Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota (Makam | 1 Makam | 77.000.000,00 | kebutuhan kebersihan TMP,Honor petugas TMP,uang makan petugas, rehab pintu TMP | Sub Kegiatan |
| 2 | 13 | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | | | 4.081.287.000,00 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | | | 4.081.287.000,00 | | |



| Kode | Rancangan Awal Tahun 2026 | | | | Rancangan Tahun 2026 | | | | ANALISA KEBUTUHAN | CATATAN PENTING | KETRANGAN |
|--------------------|--|--|--------------|---------------------|--|--|--------------|---------------------|--|-----------------|--------------|
| | Urusan/Bidang Urusan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | TARGET | Pagu Indikatif (Rp) | Urusan/Bidang Urusan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | TARGET | Pagu Indikatif (Rp) | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | 6 |
| 2.13.04 | PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA | Kategori kelurahan | Berkembang | 61.087.100,00 | PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA | Kategori kelurahan | Berkembang | 61.087.100,00 | | | Program |
| 2.13.04.2.01 | Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa | Jumlah Pembinaan Kelurahan | 20 Kelurahan | 61.087.100,00 | Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa | Jumlah Pembinaan Kelurahan | 20 Kelurahan | 61.087.100,00 | | | Kegiatan |
| 2.13.04.2.01.00018 | Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan | Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan (Dokumen) | 1 Dokumen | 61.087.100,00 | Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan | Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan (Dokumen) | 1 Dokumen | 61.087.100,00 | Lomba kelurahan makan dan snack, hadiah juara I, makan dan minum Epdeskel/Prodeskel, perjalanan dinas dalam dan luar provinsi | | Sub Kegiatan |
| 2.13.05 | PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT | Persentase lembaga masyarakat yang aktif (%) | 100% | 4.020.199.900,00 | PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT | Persentase lembaga masyarakat yang aktif (%) | 100% | 4.020.199.900,00 | | | Program |
| 2.13.05.2.01 | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah lembaga/organisasi masyarakat yang Aktif | 76 Lembaga | 4.020.199.900,00 | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah lembaga/organisasi masyarakat yang Aktif | 76 Lembaga | 4.020.199.900,00 | | | Kegiatan |
| 2.13.05.2.01.0003 | Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Lembaga) | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Lembaga) | 76 Lembaga | 586.641.500,00 | Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Lembaga) | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Lembaga) | 76 Lembaga | 586.641.500,00 | Hibah uang LPM, Karang Taruna, makan dan snack peningkatan kapasitas kelembagaan, perjalanan dinas dalam provinsi, Rakornas posyandu, (lomba Posyandu makan dan minum, Juara I), kelengkapan sarana prasarana kelengkapan tim sekretariat posyandu | | Sub Kegiatan |



| Kode | | | | | Rancangan Awal Tahun 2026 | | | | Rancangan Tahun 2026 | | | | CATATAN PENTING | KETRANGAN |
|------|----|----|------|------|---|---|------------|---------------------|---|---|------------|---------------------|--|--------------|
| | | | | | Urusan/Bidang Urusan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | TARGET | Pagu Indikatif (Rp) | Urusan/Bidang Urusan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | TARGET | Pagu Indikatif (Rp) | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | | | |
| 2 | 13 | 05 | 2,01 | 0004 | Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat (Unit) | 25 Unit | 1.650.000.000,00 | Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat (Unit) | 25 Unit | 1.650.000.000,00 | Paket sarana posyandu dan rehabilitasi bangunan Posyandu | Sub Kegiatan |
| 2 | 13 | 05 | 2,01 | 0005 | Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (Dokumen) | 1 Dokumen | 36.000.000,00 | Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (Dokumen) | 1 Dokumen | 36.000.000,00 | Makan dan snack bintek/sosialisasi pengembangan posyantek, pembinaan/pendampingan posyantek, perjalanan dinas dalam provinsi pengembangan posyantek | Sub Kegiatan |
| 2 | 13 | 05 | 2,01 | 0006 | Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (Laporan) | 1 Dokumen | 67.558.400,00 | Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (Laporan) | 1 Dokumen | 67.558.400,00 | Makan dan snack sosialisasi TTG, lomba inovasi TTG, posyantek dan TTG Unggulan, hadiah juara I, honor tim, perjalanan dinas dalam provinsi gelar TTG | Sub Kegiatan |
| 2 | 13 | 05 | 2,01 | 0009 | Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga (Dokumen) | 25 Dokumen | 1.680.000.000,00 | Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga (Dokumen) | 25 Dokumen | 1.680.000.000,00 | Hibah uang PKK Kota, PKK Kecamatan, dan PKK Kelurahan | Sub Kegiatan |



2.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan tahun 2025 melaksanakan penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat yang secara langsung menjadi program dan kegiatan yang ada di Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan dapat dilihat pada Daftar Usulan (Aspirasi) dibawah ini :

DAFTAR USULAN (ASPIRASI) MASYARAKAT DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT TAHUN 2025

| No | Program Kegiatan | lokasi | Indikat or kinerja | Besaran volume | Pagu | Catatan |
|---|--|-----------------|--------------------|----------------|----------------|-------------|
| Kegiatan Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/ Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat | | | | | | |
| 1 | Posyandu sering banjir; 1 paket; Rp 150.000.000,-; P.5 | Juata Kerikil | | 1 Paket | Rp.50.000.000 | Di akomodir |
| 2 | Posyandu Tidak Layak 1 Unit Rp200.000.000 Prioritas 4 Non Dana RT | | | | Rp.200.000.000 | Di akomodir |
| 3 | Posyandu tidak layak 1 Paket Rp.100.000.000 | Selumit pantai | | 1 Paket | Rp.200.000.000 | Di akomodir |
| 4 | Posyandu tidak layak menumpang di rumah warga untuk pembangunan 1 Paket Rp.100.000.000 prioritas 1 | Selumit pantai | | 1 Paket | Rp.200.000.000 | Di akomodir |
| 5 | Belum adanya WC dan Listrik di Posyandu Lansia " Aki Adu" Vol: 1 Posyandu Rp. 50.000.000 Prioritas 5 Non Dana RT | Karang Rejo | | 1 Posyandu | Rp.50.000.000 | Di akomodir |
| 6 | Rehab/Pemeliharaan Posyandu (Prioritas 1 Non Dana RT) Panjang = 8 m Lebar = 6 m Rp150.000.000 | Sebengk ok | | 1 Posyandu | Rp.150.000.000 | Di akomodir |
| 7 | Gedung tidak layak pakai / Volume : 1 unit Rencana biaya : Rp. 15.000.000 Prioritas 1 Non Dana RT | Kampun g Empat | | | Rp.15.000.000 | Di akomodir |
| 8 | Bangunan posyandu sebagian rusak sehingga pelayanan tidak maksimal 1 Bangunan (Posyandu Lady Valentine) Rp 200.000.000 Prioritas 1 Non Dana RT | Karang Anyar | | 1 Posyandu | Rp.200.000.000 | Di akomodir |
| 9 | Posyandu tidak layak menumpang di rumah warga untuk pembagunan | Selumit pantai | | 1 Paket | Rp.100.000.000 | Di akomodir |
| 10 | BANGUNAN TELAH DIMAKAN USIA DAN KONDISI RUSAK PARAH 1 UNIT Rp250.000.000 Prioritas 4 Non Dana RT | Gunung Li ngkas | | 1 Paket | Rp.200.000.000 | Di akomodir |
| 11 | REHAB / PEMELIHARAAN POSYANDU " 1 UNIT | Skip | | 1 Paket | Rp.50.000.000 | Di akomodir |
| 12 | Posyandu tidak memiliki toilet, pintu ruang periksa dan jendela | Juata Kerikil | | 1 Unit | Rp.50.000.000 | Di akomodir |



| | | | | | | |
|----|---|---------------------|--|---------|----------------|-------------|
| 13 | Gedung tidak layak pakai / Volume : L: 6m P: 6m Rencana biaya : Rp. 50.000.000 Prioritas 1 Non Dana RT | Kampung Empat | | 1 Paket | Rp.50.000.000 | Di akomodir |
| 14 | Bangunan posyandu sebagian rusak sehingga pelayanan tidak maksimal (Seng dan WC Rusak) 1 Bangunan Rp. 50.000.000 DINSOSPM APBD Kota (Form 4 Prioritas 1 Non Dana RT) | Pantai Amal | | 1 Paket | Rp.50.000.000 | Di akomodir |
| 15 | Bangunan posyandu sebagian rusak sehingga pelayanan tidak maksimal (Seng dan WC Rusak) 1 Bangunan Rp. 50.000.000 DINSOSPM APBD Kota (Form 4 Prioritas 1 Non Dana RT) | Pantai Amal | | 1 Paket | Rp.200.000.000 | Di akomodir |
| 16 | Rehab/Pemeliharaan Posyandu Kerusakan Fasilitas/Atap Plafon Posyandu Citra 1 Bangunan Posyandu Rp100,000,000 Prioritas 1 Non Dana RT | | | 1 Paket | Rp.100.000.000 | Di akomodir |
| 17 | Posyandu Tidak Layak 1 paket Rp150.000.000 Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat APBD Kota Pemkot Form 4 Infrastruktur, Sosial, Budaya dan Ekonomi Prioritas 1 Non Dana RT | Mamburungan | | 1 Paket | Rp.100.000.000 | Di akomodir |
| 18 | Posyandu Tidak Layak 8 m x 6 m Rp150.000.000 Prioritas 2 Non Dana RT | Karang Anyar Pantai | | 1 Paket | Rp.150.000.000 | Di akomodir |
| 19 | Atap Rusak 1 paket Rp50.000.000 Prioritas 2 Non Dana RT | Karang Anyar Pantai | | 1 Paket | Rp.50.000.000 | Di akomodir |
| 20 | REHAB POSYANDU LANSIA WELAS ASIH " 1 UNIT Rp50.000.000 Prioritas 1 Non Dana RT | Skip | | 1Unit | Rp.50.000.000 | Di akomodir |
| 21 | Rehab/Pemeliharaan Posyandu (Prioritas 2 Non Dana RT) 1 | Sebengkok | | 1Unit | Rp.50.000.000 | Di akomodir |
| 22 | Posyandu Tidak Layak 1 Bangunan Rp25.000.000 Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat APBD Kota Form 4 Infrastruktur, Sosial, Budaya dan Ekonomi Prioritas 3 Non Dana RT | Mamburungan | | 1 Paket | Rp.25.000.000 | Di akomodir |
| 23 | BANGUNAN POSYANDU PERLU DI REHAB 1 BANGUNAN Rp 200.000.000 PRIORITAS 3 NON DANA RT | Lingkas Ujung | | 1 Paket | Rp.200.000.000 | Di akomodir |
| 24 | Perbaiki Posyandu Lestari/atap bocor dan rehab | Kampung Empat | | 1Unit | Rp.50.000.000 | Di akomodir |
| 25 | Posyandu Rusak Rp50.000.000 Prioritas 1 Non Dana RT | Karang Anyar Pantai | | 1Unit | Rp.50.000.000 | Di akomodir |
| 26 | Rehab bangunan posyandu 1 paket Rp150.000.000 Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat APBD Kota Hibah Form 4 Infrastruktur, Sosial, Budaya dan Ekonomi Prioritas 5 Non Dana RT | Mamburungan | | 1 Paket | Rp.150.000.000 | Di akomodir |
| 27 | Belum ada posyandu 1 unit Rp50.000.000 Prioritas 1 Non Dana RT | Karang Anyar Pantai | | 1Unit | Rp.50.000.000 | Di akomodir |
| 28 | Posyandu melati baru rusak dan miring 9M x 7M x 3M Rp.200.000.000 | Karang Harapan | | 1 Paket | Rp.200.000.000 | Di akomodir |
| 29 | Posyandu tidak layak 1 paket Rp.50.000.000 | Karang Harapan | | 1 Paket | Rp.50.000.000 | Di akomodir |



| | | | | | | |
|----|--|---------------|--|------------|----------------|----------------------|
| 30 | Plafon dan Dinding Posyandu rusak (Posyandu Kuda Laut) Vol : 1 Unit Rp. 50.000.000 Prioritas 1 Non Dana RT | Karang Rejo | | 1Unit | Rp.50.000.000 | Di akomodir |
| 31 | Plafon dan Dinding Posyandu rusak Vol : 1 Unit Rp. 50.000.000 Prioritas 2 Non Dana RT | Karang Rejo | | 1Unit | Rp.50.000.000 | Di akomodir |
| 32 | Bangunan posyandu sebagian rusak sehingga pelayanan tidak maksimal 1 Bangunan (Posyandu Kenanga) Rp. 50.000.000 Prioritas 1 Non Dana RT | Karang Anyar | | 1 Paket | Rp.50.000.000 | Di akomodir |
| 33 | Posyandu rusak pelayanan warga tidak maksimal 1 Bangunan (Posyandu Wijaya Kusuma) Rp. 200.000.000 Prioritas 1 Non Dana RT | karang anyar | | 1 Paket | Rp.200.000.000 | Di akomodir |
| 34 | Posyandu Tidak Layak / Rencana Biaya : Rp. 50.000.000, Prioritas 1 Non dana RT | Kampung Empat | | 1 Paket | Rp.50.000.000 | Di akomodir |
| 35 | POSYANDU PERLU DI REHAB 1 BANGUNAN Rp 200.000.000 PRIORITAS 2 NON DANA RT | Lingkas Ujung | | 1 Bangunan | Rp.200.000.000 | Di akomodir |
| 36 | Posyandu belum selesai 1 Bangunan (Posyandu Bunga Lily) Rp. 200.000.000 Prioritas 1 Non Dana RT | Karang Anyar | | 1 Bangunan | Rp.200.000.000 | Di akomodir |
| 37 | Bangunan posyandu belum selesai 1 Bangunan (Posyandu Teratai) Rp. 200.000.000 Prioritas 1 Non Dana RT | karang anyar | | 1 Bangunan | Rp.200.000.000 | Di akomodir |
| 38 | Posyandu Tidak Layak 1 Bangunan Rp50.000.000 Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat APBD Kota Hibah Form 4 Infrastruktur, Sosial, Budaya dan Ekonomi Prioritas 2 Non Dana RT | Mamburungan | | 1 Bangunan | Rp.50.000.000 | Di akomodir |
| 39 | Pembangunan Posyandu | | | 1 Bangunan | Rp.100.000.000 | Usulan H. Hamka, S.E |
| 40 | Rehabilitasi | | | 1 Bangunan | Rp.100.000.000 | Usulan Mellyana |
| 41 | Pembangunan psoyandu Lingkungan | RT.1 | | 1 Bangunan | Rp.100.000.000 | Usulan Idoeliansyah |
| 42 | Rehab Pos Yandu Seruni 4 | | | | Rp.20.000.000 | Usulan Maslan |
| 43 | posyandu | | | | Rp.100.000.000 | Usulan Muhammad |





BAB III

TUJUAN DAN SASARAN



TUJUAN DAN SASARAN

Berdasarkan RPD Kota Tarakan tahun 2025-2029, Renja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan tahun 2026 merupakan tahun kedua pembangunan jangka menengah daerah, oleh karena itu segala kebijakan yang akan dilaksanakan harus mampu memberikan kontribusi yang signifikan dalam pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah.

Sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan tentang penyusunan dokumen perencanaan pembangunan, dalam merumuskan dokumen perencanaan pembangunan harus memperhatikan berbagai dokumen perencanaan pembangunan lain yang berkorelasi dan relevan. Oleh karena itu, dalam menyusun Rencana Kerja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Tarakan Tahun 2026 ini perlu adanya berbagai pemahaman dan kajian tentang dokumen perencanaan pembangunan, baik nasional, Provinsi Kalimantan Utara maupun dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Tarakan Tahun 2026.

3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

A. Prioritas dan sasaran pembangunan Nasional Tahun 2025

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah wajib menyusun RKPD yang merupakan penjabaran dari RPJMD untuk jangka waktu 1 (satu) Tahun, yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, isu strategis nasional yang sedang berkembang termasuk penanganan kemiskinan, pelayanan dasar, visi dan misi, serta program kepala daerah.

Arah kebijakan dan strategi pembangunan Nasional tahun 2025 selanjutnya dituangkan ke dalam Rancangan Awal RKP Tahun 2025 dengan 8 (Delapan) Prioritas Nasional. 8 (Delapan) Prioritas Nasional tersebut merupakan Agenda Pembangunan yang termuat dalam RPJMN Tahun 2025-2029 sebagai pelaksanaan kerangka tema, arah kebijakan dan strategi pembangunan.



Hal ini bertujuan untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta mengoptimalkan efektivitas pengendalian pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah. 8 (Delapan) Prioritas Nasional RKP Tahun 2025 disampaikan sebagai berikut :

- 1) Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia.
- 2) Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Medorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru.
- 3) Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi melalui Peran Aktif koperasi.
- 4) Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas.
- 5) Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri.
- 6) Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan.
- 7) Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan.
- 8) Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur.

Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2025

Untuk mengawal keberhasilan prioritas nasional tersebut maka Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat telah mengintegrasikan sasaran pembangunan nasional dengan Renja PD pada tahun 2025 sebagai berikut :

| | Prioritas Nasional | | Sasaran Pembangunan |
|------|--|---|---|
| PN 1 | Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia | 1 | Indeks Demokrasi Indonesia |
| PN 2 | Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Medorong Kemandirian | 1 | Asia Power Index (<i>Military Capability</i>) |
| | | 2 | Asia Power Index (<i>Diplomatic</i>) |



| | | | |
|------|--|----|---|
| | Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru | | <i>Influence)</i> |
| | | 3 | Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya |
| | | | Pravelensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (PoU) |
| | | 4 | Indeks Ketahanan Energi |
| | | 5 | Kapasitas Tampungan Air (m ³ /Kapita) |
| | | 6 | Akses Rumah Tangga Perkotaan Terhadap Air Siap Minum Perpipaian (%) |
| | | 7 | Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman (%) |
| | | 8 | Indeks Daya Saing Digital di Tingkat Global |
| | | 9 | Indeks Ekonomi Hijau |
| | | 10 | Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer |
| | | 11 | Timbunan Sampah terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah (%) |
| | | 12 | Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati |
| | | 13 | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup |
| | | 14 | Persentase Penurunan Emisi GRK - Tahunan (%) - Kumulatif (%) |
| PN 3 | Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri | 1 | Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah (%) |
| | | 2 | Rasio Kewirausahaan (%) |
| | | 3 | Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDB (%) |
| | | 4 | Rasio PDB Pariwisata (%) |



| | | | |
|------|--|----|--|
| | Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi melalui Peran Aktif koperasi | 5 | Devisa Pariwisata (Miliar USD) |
| | | 6 | Proporsi PDB Ekonomi Kreatif (%) |
| | | 7 | Aset Perbankan / PDB (%) |
| | | 8 | Aset Dana Pensiun / PDB (%) |
| | | 9 | Aset Asuransi / PDB (%) |
| | | 10 | Kapitalisasi Pasar Modal / PDB (%) |
| | | 11 | Total Kredit / PDB (%) |
| | | 12 | Inklusi Keuangan (%) |
| PN 4 | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas | 1 | Hasil Pembelajaran : a) Rata-rata Nilai PISA i. Membaca ii. Matematika iii. Sains b) Rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas (Tahun) c) Harapan Lama Sekolah (Tahun) |
| | | 2 | Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Tinggi (%) |
| | | 3 | Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah dan Tinggi yang Bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi (%) |
| | | 4 | Tingkat Penguasaan Iptek : a) Pengeluaran Iptek dan Inovasi (% PDB) b) Peringkat Indeks Inovasi Global |
| | | 5 | Tingkat Pengangguran Terbuka (%) |
| | | 6 | Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%) |
| | | 7 | Usia Harapan Hidup (Tahun) |



| | | | |
|------|---|----|---|
| | | 8 | Kesehatan Ibu dan Anak a) Angka Kematian Ibu (Per 100.000 Kelahiran Hidup) b) Prevalensi <i>Stunting</i> (Pendek dan Sangat Pendek) pada Balita (%) |
| | | 9 | Insidensi Tuberkulosis (Per 100.000 Penduduk) |
| | | 10 | Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (%) |
| | | 11 | Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga (IPKK) |
| | | 12 | Indeks Ketimpangan Gender (IKG) |
| PN 5 | Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri | 1 | Rasio PDB Industri Pengolahan (%) |
| | | 2 | Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDB) |
| | | 3 | Ekspor Barang dan Jasa (% PDB) |
| | | 4 | Biaya Logistik (% PDB) |
| PN 6 | Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan | 1 | Terbangunnya Sistem Perlindungan Sosial yang Adaptif bagi Seluruh Penduduk (%) |
| | | 2 | Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (%) |
| | | 3 | Persentase Penyandang Disabilitas yang Bekerja di Sektor Formal (%) |
| | | 4 | Proporsi Kontribusi PDRB Wilayah Metropolitan terhadap Nasional (%) |
| | | 5 | Persentase Desa Mandiri (%) |
| | | 6 | Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau, dan Berkelanjutan (%) |



| | | | |
|------|---|---|--|
| PN 7 | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan | 1 | Return on Asset (ROA) BUMN (%) |
| | | 2 | Indeks Integritas Nasional |
| | | 3 | Indeks Materi Hukum |
| | | 4 | Indeks Pelayanan Publik |
| | | 5 | Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik |
| | | 6 | Indeks Persepsi Korupsi |
| | | 7 | Indeks Pembangunan Hukum |
| | | 8 | Rasio Perpajakan terhadap PDB (%) |
| | | 9 | Tingkat Inflasi (%) |
| PN 8 | Memperkuat Penyelesaian Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur | 1 | Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) |
| | | 2 | Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) |
| | | 3 | Proporsi Kerugian Ekonomi Langsung Akibat Bencana Relatif terhadap PDB (%) |

B. Prioritas dan sasaran pembangunan Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025

Tahapan pembangunan jangka menengah daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun periode 2021-2026 memasuki tahun ke empat. Dalam rangka mencapai visi pembangunan Provinsi Kalimantan Utara periode 2021-2026, maka ditetapkan tema atau fokus pembangunan Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025 :

“Pemantapan Industri dan Perdagangan komoditas Unggulan Daerah”

Pada Tahun 2025 dipastikan sebagian besar target dari tujuan dan sasaran sesuai visi dan misi Provinsi Kalimantan Utara 2021-2026 dapat tercapai, yang memastikan semakin meningkatnya manfaat dan hasil nyata pelaksanaan program



dan kegiatan seluruh perangkat daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan Pemerintah Desa/Kelurahan bagi perubahan, kemajuan rakyat dan kemajuan daerah. Hal tersebut didukung oleh semakin mantapnya kualitas inovasi industri daerah dan kemajuan perdagangan produk unggulan industri yang didukung kualitas sumberdaya manusia, kuantitas dan kualitas infrastruktur dan tata kelola pemerintahan yang baik. Dengan kondisi semakin tingginya pertumbuhan serta pemerataan ekonomi.

Dengan mencermati dan memahami dinamika pembangunan, permasalahan, dan menelaah sasaran dan prioritas dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Utara 2021-2026 khususnya tahun 2025 dengan tema pembangunan Provinsi Kalimantan Utara maka prioritas pembangunan Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025 diuraikan sebagai berikut :

1. Pembangunan PLTA Sungai Mentarang dan Sungai Kayan.
2. Pembangunan Kawasan Industri dan Pelabuhan Internasional (KIPI)
3. Penguatan Ketahanan Pangan Daerah dengan Pembangunan Pertanian dalam arti luas dan Jaminan Perlindungan kepada Petani, Nelayan dan Petani Tambak tambak di setiap Kabupaten/Kota.
4. Penguatan Konektivitas Kawasan Perbatasan, Pedalaman dan Daerah terpencil dalam Membangun Desa Menata Kota di setiap Kabupaten/Kota.
5. Pembangunan Infrastruktur Desa dan Kelurahan di Kabupaten/Kota.
6. Pembangunan Ekonomi melalui Diversifikasi Produk dan Keunggulan Komperatif di setiap Kabupaten/Kota.
7. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia melalui Pendidikan Wajib Belajar 16 Tahun yang Berwawaskan.
8. Pengadaan Balai Latihan Kerja, Perluasan Lapangan Kerja, Kesempatan Usaha dan Ekonomi Kreatif bagi Kaum Milenial.
9. Pengelolaan Bantuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi Pelaku Umkm di Setiap Kabupaten/Kota
10. Pemberian Tunjangan Perbaikan Penghasilan bagi Aparat Desa dan RT, Tenaga Pendidikan, dan Kependidikan pada Semua Tingkatan Satuan Pendidikan, Tenaga Kesehatan serta Tenaga Honorer di Daerah Perbatasan, Pedalaman dan Terpencil serta Perkotaan sesuai dengan Kemampuan Keuangan Daerah.



3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA TARAKAN.

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan kinerja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat selama lima tahun.

Dalam menentukan tujuan dan sasaran Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat maka telah dirumuskan bahwa tujuan yang ingin dicapai dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya untuk mendukung TUJUAN DAN SASARAN dan Program Pemerintah Kota Tarakan Tahun 2025 - 2029, Adapun Tujuan yang ingin dicapai adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya Kesejahteraan Sosial Keluarga Miskin dan Tidak Mampu.
2. Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pembangunan.
3. Meningkatnya Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah.

Disamping merumuskan tujuan yang akan dicapai dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat, maka ditetapkan Indikator Sasaran dalam periode Tahun 2025-2029, sebagai berikut :

1. Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Masyarakat (PPKS).
2. Terwujudnya Kemampuan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Dalam Kesejahteraan Sosial.
3. Terwujudnya Sarana Pelestarian Nilai Kepahlawanan.
4. Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan.
5. Meningkatnya Akuntabilitas Nilai Kinerja Perangkat Daerah.

Tujuan dan sasaran Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat pada dokumen Rencana Kerja (Renja) beserta target indikator sasaran pada tahun 2026 dapat dilihat pada tabel 5 sebagai berikut :



Tabel 4

Tujuan dan Sasaran Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat

| Tujuan | Indikator Tujuan | Sasaran Strategis | Indikator Sasaran | Kondisi Awal | Target 2026 |
|---|-----------------------------|--|---|--------------|-------------|
| Menurunnya Tingkat kemiskinan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat | Indeks Kesejahteraan Sosial | Meningkatnya pemenuhan kebutuhan dasar pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) | Persentase PPKS yang memperoleh bantuan Sosial | 54,78 | 55,88 |
| | | pelestarian nilai kepahlawanan TMP | Indeks kepuasan pengunjung TMP | 74,84 | 76,15 |
| | | Meningkatnya Keberdayaan lembaga kemasyarakatan yang inovatif dalam pembangunan | Persentase lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam pembangunan | 8,92 | 14,39 |
| | | Meningkatnya Tata Kelola Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat | Nilai SAKIP | 67,65 | 70,26 |





BAB IV PROGRAM DAN KEGIATAN

sasaran dan tujuan. Sedangkan program dimaksudkan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan perangkat daerah guna mencapai sasaran tertentu. Dengan adanya program dan kegiatan diharapkan pula dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi.

Program dan kegiatan Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan yang direncanakan untuk periode 2026 dapat dilihat pada Tabel dibawah ini :



Tabel 5
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2026
Kota Tarakan

DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

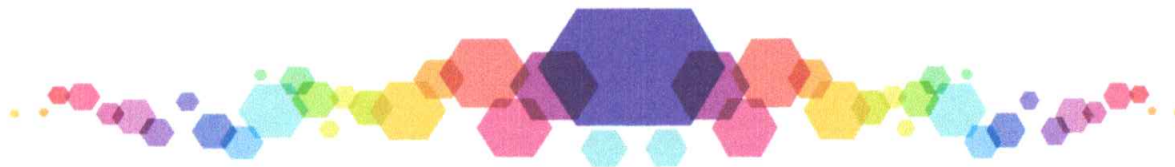
| TUJUAN | SASARAN | Rancangan Awal Tahun 2026 | | | | UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWA B (BIDANG) | |
|--|---|---|--|----------------|---------------------|---|---------|
| | | Urusan/Bidang Urusan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | TARGET | Pagu Indikatif (Rp) | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL | | | | 7.730.796.698,00 | |
| Terwujudnya Tata Kelola Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat | Meningkatnya Tata Kelola Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | | 5.890.147.158,00 | Program |
| | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi yang tersedia | 3 Dokumen | 8.940.000,00 | Kegiatan | |
| | | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan) | 3 Laporan | 1.980.000,00 | Sub Kegiatan | |
| | | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan) | 3 Laporan | 1.980.000,00 | Sub Kegiatan | |
| | | Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah | Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen) | 3 Dokumen | 4.980.000,00 | Sub Kegiatan | |
| | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Jumlah layanan Administrasi Keuangan yang diselesaikan tepat waktu | 2 Layanan | 5.032.552.648,00 | Kegiatan | |
| | | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan) | 52 Orang/Bulan | 4.970.496.648,00 | Sub Kegiatan | |
| | | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen) | 4 Dokumen | 62.056.000,00 | Sub Kegiatan | |



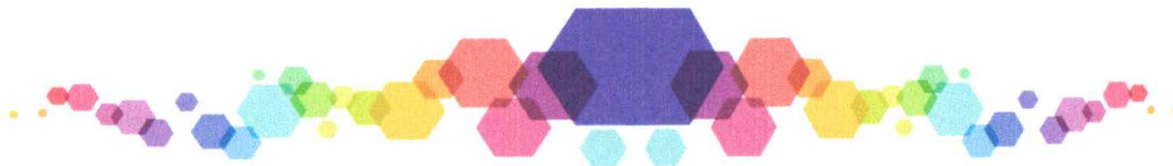
| TUJUAN | SASARAN | Rancangan Awal Tahun 2026 | | | | UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB (BIDANG) |
|--|---|--|---|------------|---------------------|--|
| | | Urusan/Bidang Urusan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | TARGET | Pagu Indikatif (Rp) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Terwujudnya Tata Kelola Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat | Meningkatnya Tata Kelola Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Tersedianya layanan administrasi Kepegawaian | 1 Laporan | 47.125.000,00 | Kegiatan |
| | | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket) | 1 Paket | 47.125.000,00 | Sub Kegiatan |
| | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah layanan administrasi umum yang terlaksana | 6 Layanan | 217.009.380,00 | Kegiatan |
| | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket) | 1 Paket | 4.978.700,00 | Sub Kegiatan |
| | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket) | 1 Paket | 3.000.000,00 | Sub Kegiatan |
| | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket) | 2 Paket | 72.340.280,00 | Sub Kegiatan |
| | | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket) | 1 Paket | 23.750.000,00 | Sub Kegiatan |
| | | Fasilitas Kunjungan Tamu | Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan) | 4 Laporan | 6.000.000,00 | Sub Kegiatan |
| | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan) | 23 Laporan | 106.940.400,00 | Sub Kegiatan |
| Terwujudnya Tata Kelola Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat | Meningkatnya Tata Kelola Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah aset/BMD yang diadakan | 8 Jenis | 321.966.500,00 | Kegiatan |
| | | Pengadaan Mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit) | 10 Unit | 100.000.000,00 | Sub Kegiatan |
| | | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit) | 35 Unit | 161.966.500,00 | Sub Kegiatan |
| | | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit) | 5 Unit | 60.000.000,00 | Sub Kegiatan |
| | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Tersedianya layanan jasa penunjang | 2 Layanan | 103.700.000,00 | Kegiatan |



| TUJUAN | SASARAN | Rancangan Awal Tahun 2026 | | | | UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWA B (BIDANG) |
|---|--|---|---|------------|---------------------|---|
| | | Urusan/Bidang Urusan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | TARGET | Pagu Indikatif (Rp) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan) | 1 Laporan | 1.800.000,00 | Sub Kegiatan |
| | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) | 12 Laporan | 101.900.000,00 | Sub Kegiatan |
| | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah aset/BMD yang dipelihara | 68 Unit | 158.853.630,00 | Kegiatan |
| | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit) | 2 Unit | 65.560.000,00 | Sub Kegiatan |
| | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit) | 15 Unit | 78.023.630,00 | Sub Kegiatan |
| | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) | 50 Unit | 15.270.000,00 | Sub Kegiatan |
| Menurunnya Tingkat kemiskinan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat | Meningkatnya pemenuhan kebutuhan dasar pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) | PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL | Persentase PSKS yang Meningkatkan Kompetensinya dalam Pelayanan Sosial (%) | 100% | 84.016.700,00 | Program |
| | | Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang (Dokumen) | 6 Izin | 10.000.000,00 | Kegiatan |
| | | Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang (Dokumen) | 1 Dokumen | 10.000.000,00 | Sub Kegiatan |
| | | Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah potensi Sumber Daya Kesejahteraan Sosial | 3 Dokumen | 74.016.700,00 | Kegiatan |
| | | Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota (Keluarga) | 4 Keluarga | 6.000.000,00 | Sub Kegiatan |



| TUJUAN | SASARAN | Rancangan Awal Tahun 2026 | | | | UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB (BIDANG) |
|--------|---------|--|---|------------|---------------------|--|
| | | Urusan/Bidang Urusan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | TARGET | Pagu Indikatif (Rp) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota (Lembaga) | 14 Lembaga | 3.600.000,00 | Sub Kegiatan |
| | | Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) | Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) yang mendapatkan Peningkatan Kapasitas dan fasilitasi dalam penanganan kasus Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang) | 20 Orang | 20.000.000,00 | Sub Kegiatan |
| | | Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Penyuluh Sosial, Penyuluh Sosial Masyarakat, Pekerja Sosial, Pekerja Sosial Masyarakat dan/atau Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang Meningkatkan Kapasitasnya (Orang) | 124 Orang | 44.416.700,00 | Sub Kegiatan |
| | | PROGRAM REHABILITASI SOSIAL | Persentase penyandang disabilitas, Anak Terlantar, Lanjut Usia terlantar serta gelandangan pengemis terlantar di luar panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (%) | 100% | 266.865.840,00 | Program |
| | | Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial | Jumlah penyandang disabilitas, Anak Terlantar, Lanjut Usia terlantar serta gelandangan pengemis terlantar di luar panti yang di jangkau | 374 Orang | 266.865.840,00 | Kegiatan |
| | | Penyediaan Permakanan | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang) | 200 Orang | 49.956.420,00 | Sub Kegiatan |
| | | Penyediaan Sandang | Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang) | 10 Orang | 10.000.000,00 | Sub Kegiatan |
| | | Penyediaan Alat Bantu | Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang) | 22 Orang | 100.000.000,00 | Sub Kegiatan |
| | | Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang) | 25 Orang | 45.000.000,00 | Sub Kegiatan |
| | | Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial | Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang) | 64 Orang | 12.000.000,00 | Sub Kegiatan |



| TUJUAN | SASARAN | Rancangan Awal Tahun 2026 | | | | UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB (BIDANG) |
|--------|---------|---|---|-------------|---------------------|--|
| | | Urusan/Bidang Urusan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | TARGET | Pagu Indikatif (Rp) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Pemberian Layanan Data dan Pengaduan | Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang) | 2.600 Orang | 10.000.000,00 | Sub Kegiatan |
| | | Pemberian Layanan Kedaruratan | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang) | 24 Orang | 30.000.000,00 | Sub Kegiatan |
| | | Pemberian Layanan Rujukan | Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang) | 5 Orang | 9.909.420,00 | Sub Kegiatan |
| | | PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL | Persentase Penerima Manfaat yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar (Persentase) | 30% | 1.297.777.000,00 | Program |
| | | Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Data fakir miskin yang di muktahirkan | 2022 KPM | 1.297.777.000,00 | Kegiatan |
| | | Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata (Orang) | 2.022 Orang | 85.000.000,00 | Sub Kegiatan |
| | | Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat | Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang) | 10 Orang | 50.000.000,00 | Sub Kegiatan |
| | | Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga | Jumlah Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang) | 3.447 Orang | 53.977.000,00 | Sub Kegiatan |
| | | Fasilitasi Bantuan Jaminan Sosial bagi Pekerja Rentan Miskin | Jumlah Pekerja Rentan Miskin yang Mendapatkan Bantuan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang) | 5.909 Orang | 1.108.800.000,00 | Sub Kegiatan |
| | | PROGRAM PENANGANAN BENCANA | Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota (%) | 100% | 114.990.000,00 | Program |
| | | Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota | Persentase layanan penanganan bencana alam dan sosial | 100% | 54.990.000,00 | Kegiatan |
| | | Penyediaan Makanan | Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang) | 298 Orang | 49.990.000,00 | Sub Kegiatan |
| | | Pelayanan Dukungan Psikososial | Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang) | 100 Orang | 5.000.000,00 | Sub Kegiatan |
| | | Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota | Jumlah penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap kesiapsiagaan Bencana | | 60.000.000,00 | Kegiatan |



| TUJUAN | SASARAN | Rancangan Awal Tahun 2026 | | | | UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWA B (BIDANG) |
|--|---|--|---|--------------|-------------------------|---|
| | | Urusan/Bidang Urusan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | TARGET | Pagu Indikatif (Rp) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana | Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang) | 64 Orang | 30.000.000,00 | Sub Kegiatan |
| | | Peningkatan Kapasitas Relawan Taruna Siaga Bencana Tingkat Muda | Jumlah Relawan Taruna Siaga Bencana Tingkat Muda yang Meningkatkan Kapasitasnya (Orang) | 64 Orang | 30.000.000,00 | Sub Kegiatan |
| Terwujudnya pelestarian nilai kepahlawanan (eselon II) | Meningkatnya sarana pelestarian nilai kepahlawanan TMP | PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN | Persentase layanan pengelolaan taman makam pahlawan (%) | 100% | 77.000.000,00 | Program |
| | | Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota | Jumlah Taman Makam Pahlawan yang dipelihara | 1 TMP | 77.000.000,00 | Kegiatan |
| | | Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota | Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharaannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota (Makam | 1 Makam | 77.000.000,00 | Sub Kegiatan |
| | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | | | 4.081.287.000,00 | |
| Terwujudnya Keberdayaan masyarakat dalam pembangunan | Meningkatnya Keberdayaan lembaga kemasyarakatan yang inovatif dalam pembangunan | PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA | Kategori kelurahan | Berkembang | 61.087.100,00 | Program |
| | | Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa | Jumlah Pembinaan Kelurahan | 20 Kelurahan | 61.087.100,00 | Kegiatan |
| | | Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan | Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan (Dokumen) | 1 Dokumen | 61.087.100,00 | Sub Kegiatan |
| | | PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT | Persentase lembaga masyarakat yang aktif (%) | 100% | 4.020.199.900,00 | Program |
| | | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah lembaga/organisasi masyarakat yang Aktif | 76 Lembaga | 4.020.199.900,00 | Kegiatan |



| TUJUAN | SASARAN | Rancangan Awal Tahun 2026 | | | | UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWA B (BIDANG) |
|--------|---------|---|--|------------|---------------------|---|
| | | Urusan/Bidang Urusan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | TARGET | Pagu Indikatif (Rp) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Lembaga) | 76 Lembaga | 586.641.500,00 | Sub Kegiatan |
| | | Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat (Unit) | 25 Unit | 1.650.000.000,00 | Sub Kegiatan |
| | | Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (Dokumen) | 1 Dokumen | 36.000.000,00 | Sub Kegiatan |
| | | Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (Laporan) | 1 Dokumen | 67.558.400,00 | Sub Kegiatan |
| | | Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga (Dokumen) | 25 Dokumen | 1.680.000.000,00 | Sub Kegiatan |





BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan Tahun 2026 merupakan pedoman dan alat ukur atas pelaksanaan Program dan Kegiatan DINSOSPM Kota Tarakan selama Tahun 2026. Renja DINSOSPM Kota Tarakan diharapkan biar dijadikan bagian terpenting dari upaya untuk mewujudkan Visi dan Misi yang telah ditetapkan.

Rencana Kerja memuat tujuan dan sasaran, program kegiatan yang harus diimplementasikan oleh seluruh jajaran organisasi dalam rangka pencapaian tujuan dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan serta merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Tahun 2026, yang juga digunakan sebagai dasar penyusunan APBD.

Dengan mengintegrasikan berbagai keahlian sumber daya lain yang dimiliki Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat penyusunan Renja diharapkan mampu mengantisipasi sekaligus menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis baik di intern Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat maupun di lingkup daerah.

Akhirnya dengan tersusunnya Renja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan Tahun 2026 semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak dan mampu mendorong pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan di dalam dokumen RKPD.

Tarakan, 24 September 2025

Kepala,

A R B A I N, SE. M. AP
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19660616 199803 1 006